

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontestasi pemilihan kepala desa atau biasa dikenal sebagai pilkades sangat sering dianggap dinamis karena banyak dipenuhi dengan dinamika dan fenomena-fenomena yang mengiringi. Terjadinya kontestasi memiliki arti tidak terlepasnya dari sebuah perebutan kekuasaan antara para pemangku kepentingan sehingga dengan berbagai cara apapun akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk dapat merebut kekuasaan tersebut. Kekuasaan menjadi sebuah pusat yang sangat penting dalam menentukan arah kemenangan kandidat dimana dengan diketahuinya sumber pemilik kekuasaan akan mempermudah pemetaan arah politik selanjutnya dalam menjalankan roda kontestasi politik untuk memperebutkan sebuah kekuasaan seperti halnya dengan pemilihan kepala desa di Kabupaten Gresik.

Bulan Juli tahun 2019 silam merupakan musim pilkades serentak di Kabupaten Gresik. Pilkades serentak tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 juli 2019 yang diikuti oleh 265 desa di 18 kecamatan di Kabupaten Gresik. Dasar dari pemilihan kepala desa ini merujuk pasal 154 peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 yang telah diubah dengan peraturan pemerintahan (PP) Nomor 11 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Perda Nomor 12 tahun 2015 yang diubah dengan Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa (Kades).

Di Gresik, beberapa desa berlangsung panas hingga beberapa calon dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kecurangan dan dua kandidat memiliki suara yang sama, permasalahan ini terjadi di desa Klangonan, Kecamatan Kebomas. Di desa lainnya, desa Ngabetan dan desa Bambe, kecamatan Cerme, panitia pelaksana Pilkades didemo oleh massa dan menuntut diadakannya pemilihan ulang, hal ini diakibatkan oleh penutupan waktu coblosan yang tidak

sesuai, dimana seharusnya selesai pukul 13.00 namun molor menjadi 16.00.¹ Panasnya gesekan selama Pilkades berlangsung juga diwarnai pemukulan terhadap salah satu pendukung oleh anak Calon Kepala Desa. Hal ini terjadi di desa Ngimboh, Kecamatan Ujung Pangkah. Pelaku pemukulan merupakan anak pemenang Pilkades desa Ngimboh, yaitu Anna Mukhlisa yang juga istri dari anggota DPRD kabupaten Gresik, Taufiqul Umam.²

Salah satu fenomena Pilkades yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pemilihan Kepala Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme. Dalam Pilkades ini melibatkan 3 calon, 2 calon merupakan Kepala Desa di Periode sebelumnya, yaitu Ali Masudi (Kades periode 2009 – 2013) dan Sunadi (Kades periode 2014 – 2019). Kandidat “penantang” ini bernama M. Taufiq dan hingga saat ini masih memimpin perolehan suara, yaitu dengan perolehan 933 suara. Fakta ini sangatlah menarik untuk diteliti karena sebagai pendatang baru mampu mengalahkan petahana yang “hanya” memperoleh suara sebesar 817 suara. Di sisi lain, M. Taufiq berprofesi sebagai kuli batu/tukang sedangkan Sunadi merupakan mantan guru dan berpendidikan lulusan S1, hal ini menyiratkan bahwa faktor pendidikan bukanlah menjadi penghalang seseorang untuk menjadi pemimpin.³ Kontestasi di desa Ngabetan ini menarik jika dibandingkan dengan beberapa desa di Kecamatan Cerme lainnya karena menghasilkan petahana sebagai pemenang, seperti di desa Iker-iker merupakan petahana 3 periode, di desa Jono, Duro, Tambak beras, Cagak Agung, Lengkong, Sukoanyar, Dadap Kuning merupakan Kepala Desa petahana 2 periode.

Sosok M.Taufiq merupakan seseorang yang sangat ramah dan disegani oleh masyarakat Desa Ngabetan, M.Taufiq sendiri terbilang masih muda yakni 35 tahun, banyak anak-anak muda yang suka berbincang-bincang dengan beliau, karena dengan kesederhanaan dan kerendahan yang dimiliki oleh M.Taufiq inilah yang memikat para masyarakat kecil yang ada di Desa Ngabetan, untuk memenangkan

¹ Deni Ali Setiono, <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pasca-pilkades-beberapa-desa-di-gresik-ajukan-gugatan/> dikunjungi pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 20:21

² Hamzah Arfah, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/03/19285871/buntut-pilkades-anak-anggota-dprd-gresik-dilaporkan-ke-polisi> dikunjungi pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 20:25

³ Informasi ini didapat melalui wawancara bersama bapak Syahid BPD kecamatan Cerme pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 18:40

kontestasi pilkades di Desa tersebut, M.Taufiq sendiri hanyalah seorang kuli batu/kuli bangunan di desa yang ditinggalinya, ia juga bukan warga asli dari Desa Ngabetan, dengan hal itu tidak membuat semangat M.Taufiq berkurang, walaupun dengan beground yang dimilikinya hanyalah seorang kuli batu M.Taufiq sering membantu untuk membangun fasilitas desa, seperti pembangunan di Desa Ngabetan ia membantu dengan menyediakan alat berat untuk meruntuhkan bangunan yang dulu tanpa di pungut biaya.

Dengan adanya hal seperti ini membuka sebuah harapan baru untuk masyarakat Desa Ngabetan kedepannya. Modal inilah yang akan membuat hati masyarakat Desa Ngabetan senang dan mendapatlah kepercayaan dari masyarakat yang sangang membantu pemenangan kontestasi yang terjadi di Desa Ngabetan. Dalam pilkades, para kandidat memiliki suatu modal sosial sangatlah dibutuhkan dan penting. Kandidat yang memiliki modal sosial yang tinggi memang sangatlah penting untuk memenangkan pilkades karena dengan adanya modal tersebut masyarakat akan dapat mengenal baik secara fisik maupun sosial para kandidat yang memiliki modal sosial tinggi. Dengan adanya indikasi-indikasi tersebut pemilih akan dapat menilai apakah kandidat tersebut pantas untuk dipilih atau tidak.

Diamati dari segi politik M.Taufiq terbilang tidak memiliki sebuah pengalaman dalam dunia politik, berbeda dengan kedua lawannya yakni Ali Masudi dan Sunadi yang memiliki pengalaman menjadi kepala desa walaupun hanya satu priode. Kemenangan M.Taufiq pada pilkades 2019 mempunyai banyak tim sukses dari kalangan masyarakat yang terbilang orang bawah yang tidak memiliki jabatan atau status apapun di Desa Ngabetan, sedangkan lawan dari M.Taufiq sendiri memiliki dukungan dari para kiyai, perangkat desa dan orang-orang yang memiliki jabatan ataupun status di desa tersebut.

Selain fenomena tersebut yang tidak kalah menarik ialah politik uang pada pilkades di Desa Ngabetan. Para kandidat melakukan sebuah money poliik yakni memberikan uang kepada masyarakat Desa Ngabetan, hal tersebut dilakukan agar dapat memenangkan kontestasi pilkades tersebut, tidak asing lagi politik uang tidak dilakukan di Desa Ngabetan saja melainkan di desa-desa lainnya, tetapi biasanya politik uang akan dimenangkan oleh kandidat yang memberikan uang yang lebih banyak dari kandidat-kandidat lain. Berbeda dengan di Desa Ngabetan pelaksanaan

politik uang yang dilakukan oleh para kandidat dimenangkan oleh M.Taufiq yang memberikan uang dengan jumlah yang lebih rendah dari para lawannya. Dengan demikian modal sosial memang berperan penting di Desa Ngabetan.

Politik memiliki biaya tinggi sudah menjadi bagian dari agenda pemilihan pemimpin di Indonesia. Tidak hanya di tataran nasional, di tingkat Pilkades pun modal yang dikucurkan oleh seorang calon terbilang tinggi. Di Kediri misalnya, modal yang harus disiapkan selama kontestasi Pilkades mulai dari 100 juta hingga 1 miliar, hal ini tergantung setidaknya ada 3 faktor, yaitu : jumlah kontestan (semakin sedikit maka semakin ketat, akibatnya antar kontestan makin banyak menggelontorkan uang), jumlah warga dalam sebuah desa (hal ini ada kaitannya dengan politik uang) dan peran Botoh (petaruh) dalam menjagokan salah satu calon dan memberikan modal dalam kontestasi Pilkades ini.⁴ Hal yang tak kalah mengherankan juga terjadi di Sragen, di mana bupati Sragen, Kusnidar Untung Yuni Sukowati mengaku terdapat kontestan Pilkades yang mendatangnya untuk memberikan pinjaman modal sebagai ongkos politik Pilkades. Hal ini menurutnya mencederai semangat anti politik uang yang digembar-gemborkan oleh pemerintah kabupaten Sragen ini. Tak tanggung-tanggung, untuk mencegah politik uang, ia membentuk satgas *politik uang*. Menurutnya, politik transaksional ini akibat dari perubahan sistem pemilihan umum menjadi pilihan langsung, ia mendasarkan dari pengalaman maraknya politik uang ketika musim pilpres, pileg, pilbup tiba di mana terjadi praktek jual beli suara.⁵

Kondisi biaya politik tinggi ini juga terjadi di Gresik di mana seorang calon kepala desa berani membayar sebuah surat suara seharga 300 ribu rupiah dengan sistem 100 ribu sebagai uang muka dan sisanya akan dibayarkan ketika calon tersebut terpilih. Dengan berbekal tambak, calon tersebut hendak membeli suara sebanyak 1500 pemilih dari total 2500 pemilih yang ada di salah satu desa di kota Benjeng tersebut. Hal yang tidak kalah mengagetkan adalah di desa Kedamean

⁴ <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/10/18/161564/pilkades-di-kediri-siap-modal-sampai-rp-1-miliar> dikunjungi pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 19:34

⁵ <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/09/09/154982/oknum-calon-kades-nekat-utang-ke-bupati-buat-modal-beli-suara-pemilih> dikunjungi pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 18.45

seorang calon kepala desa berani menghargai sebuah surat suara seharga 1 juta rupiah dan telah menyiapkan modal berkisar Rp 5-6 Miliar untuk modal kampanye dan memberi surat suara calon pemilih.⁶ Merujuk Peraturan Bupati Gresik nomor 7 tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2014 diputuskan bahwa Kepala Desa mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp. 1.900.000 per bulan, artinya adalah sangatlah mengherankan para kontestan berebut jabatan Kepala Desa jika motivasinya adalah hanya hasil dari pendapat tetap bulanan jika melihat modal yang harus dikeluarkan untuk sebuah jabatan yang berdurasi 6 tahun sejak dilantik.

Pemilihan kepala desa yang sudah lama terjadi tidak asing dengan kontestan Petahana, petahana ialah salah satu kontestan yang pada saat dilaksanakannya pemilihan merupakan kandidat yang memegang kekuasaan jabatan politik sebelumnya.⁷ Dengan adanya petahana maka ada strategi politik yang ketat untuk para kontestan agar bisa memperebutkan jabatan yang ingin diraihinya, karena keberadaan petahana dalam kontestasi pilkades akan menjadi penghalang bagi para kontestan untuk mendapatkan suara, karena kebanyakan yang ditemui dalam masyarakat desa lebih mendukung untuk pemimpin sebelumnya agar memenangkan perebutan kekuasaan, dan kurangnya kepercayaan apabila ada kandidat-kandidat baru dalam kontestasi kepala desa. Dengan peristiwa tersebut banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh para kontestan untuk menjatuhkan para pesaingnya. Di beberapa daerah di Indonesia, tingkat kegagalan petahana maju ke periode cukuplah tinggi. Sebagai contoh, di kabupaten Padang Lawas sebesar 58 persen petahana tumbang oleh penantang. Kecamatan terbanyak di mana petahana kalah adalah di kecamatan Barumon. Lima desa yang menggelar Pilkades keseluruhan dimenangkan oleh penantang. Selain itu, di kecamatan Sihapas Barumon, empat dari enam Pilkades dimenangkan oleh pendatang baru/penantang.⁸ Hal yang tidak jauh berbeda terjadi di kabupaten

⁶ <https://www.bangsaonline.com/berita/59792/politik-uang-di-pilkades-gresik-sulit-dihindari-cakades-berani-beri-rp-300-ribupemilih> dikunjungi pada tanggal 11 Maret pukul 18:57

⁷ Ellu M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 66.

⁸ <https://harianandalas.com/sumatera-utara/fenomena-pilkades-di-palas-58-persen-petahana-gagal-pertahankan-jabatan dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 20:13>

Sragen, dari 167 desa yang menyelenggarakan Pilkades, sebanyak 58 calon Kepala Desa tumbang oleh penantangannya.⁹

Pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adanya otonomi desa berarti adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tanggahnya sendiri dengan dasar dari prakarsa dari masyarakat.¹⁰ Namun dalam pelaksanaannya hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap mengunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di desa kepala desa mengemban fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa. Dimana kita ketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹². Keberadaan Perangkat desa ini memiliki peran krusial karena mengingat bahwa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku menjadi penting untuk mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan filosofis kenegaraan dan kebudayaan yang telah diakui secara nasional¹³

Pilkades selanjutnya di atur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang sebelumnya diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun

⁹ <https://joglosemarnews.com/2019/10/fenomena-pilkades-sragen-sebanyak-58-calon-petahana-tumbang-rata-rata-kalah-di-tangan-pendatang-baru/> dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 20:35

¹⁰ Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, (Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama, 2003) hal. 116.

¹¹ Prof. Drs. Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003) hal. 166

¹² Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹³ Ledge, J. *Central Authority and Regional in Indonesia*. (New York: Cornell University Press, 1961). hlm. 31

2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui pemerintahan desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa berhak, memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Fakta yang telah dipaparkan di atas tadi merupakan sebuah bentuk konkrit adanya praktik klientelisme yang berlangsung dalam proses Pilkada di Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Sebuah praktik pertukaran kepentingan antara kandidat politik dengan pemilih atau pendukung. Fenomena klientelisme merupakan sebuah praktik yang sangat umum dilakukan di berbagai negara bahkan Indonesia sendiri. Namun, belum banyak penelitian yang membahas bagaimana praktik klientelisme di Indonesia tersebut berjalan (Tomsa dan Ufen, 2012). Temuan Aspinall dan Ward (2019) dalam penelitiannya mengenai studi komparatif praktik klientelisme di Indonesia dengan India dan Argentina menunjukkan bahwa di Indonesia memiliki variasi tingkat kecenderungan dan bentuk klientelisme yang beragam di tiap-tiap daerah. Hal tersebut memantik peneliti untuk mempelajari bagaimana praktik klientelisme di dalam Pemilihan Kepala Desa Ngabetan Kabupaten Gresik. Hal yang menarik dari Pilkades di Desa Ngabetan adalah dari 3 kandidat yang maju memainkan praktik klientelisme, namun dimenangkan oleh satu kandidat yang merupakan pemain baru dalam politik dan mampu mengalahkan 2 kandidat yang merupakan petahana. Selain itu, modal yang dikeluarkan oleh penantang tersebut jauh lebih kecil. Fakta tersebut kemudian mendorong peneliti untuk membahas lebih lanjut bagaimana praktik klientelisme yang dilakukan dalam proses Pilkada di Tahun 2019 di Desa Ngabetan Gresik tersebut.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari Fenomena kemenangan kepala desa yang terdapat di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yakni;

1. Bagaimana pola transaksi jual-beli suara yang dilakukan oleh para kandidat pada Pilkades Ngabetan Tahun 2019?

2. Bagaimana bentuk klientelisme yang terjadi di balik kemenangan kandidat kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan penelitian

Dari penelitian ini, akan mendapatkan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh peneliti, tujuan-tujuan itu ialah:

Mengetahui bagaimana calon Pemilihan Kepala Desa Ngabetan Kecamatan Cerme kabupaten Gresik dalam meraih dukungan warga melalui praktik klientelisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah manfaat yang baik besar ataupun kecil yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini pula juga akan sangat diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam hasil penelitian ini pula memiliki beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya akan berharap dapat memberikan sebuah tambahan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didalamnya mengandung unsur sosial dan politik. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi arahan yang sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan kajian ilmu politik, dan terutama pada pemilihan kepala desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh oleh peneliti sendiri ialah pada penelitian ini dapat menjadi semua media untuk pembelajaran dan bagi peneliti juga penelitian ini sangat bermanfaat untuk memecahkan sebuah permasalahan sosial politik yang ada pada tatanan masyarakat pedesaan dengan sebuah pemikiran yang

sangat ilmiah dan rasional, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari penelitian ini, dan tidak hanya itu saja melainkan ada manfaat lagi bagi peneliti yakni dapat mengetahui proses strategi pilkades M.Taufiq dalam memenangkan pilkades yang telah diselenggarakan di Desa Ngabetan.

2. Bagi Masyarakat

Manfaat yang didapat oleh masyarakat ialah sebuah informasi yang sangat penting dalam keadaan sosial politik pada kontestasi pemilihan Kepala Desa di Desa Ngabetan.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Kontestasi

Kontestasi politik adalah serangkaian kegiatan dimana adanya sebuah pertarungan yang memiliki kekuatan antara setiap politisi yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin. Para politisi yang mencalonkan diri akan melakukan persaingan dalam merebut kekuasaan yang di inginkan. Dengan berbagai macam cara dan strategi yang sudah dibangun oleh para politisi yang ingin merebutkan kekuasaan menjadi sebuah acuan dalam memenangkan kontestasi politik. Selain hanya strategi politisi juga memiliki acuan kemenangan berupa sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki masing-masing politisi yakni meliputi pendidikan, kekayaan, dan lain sebagainya hal ini mampu menjadi sebuah alat bagi politisi untuk melakukan pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan politik. Sumber-sumber kekuasaan juga dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang dapat menjatuhkan lawan politiknya.¹⁴

Demikian halnya dengan kontestasi politik yang ada di desa, dimana adanya ajang persaingan dalam pemilihan kepala desa yakni antara calon kandidat kepala desa untuk memperoleh kekuasaan politiknya. Pada kontestasi politik di desa tidak hanya dilakukan oleh para calon kandidat kepala desa melainkan pendukung para

¹⁴ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 81.

calon kandidat ikut andil dalam memperoleh kepentingannya masing-masing¹⁵. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam persaingan ini akan menjalankan strategi masing-masing agar dapat mendapatkan perhatian masyarakat untuk mendapatkan suara pemilih senggi dapat mencapai sebuah kekuasaan yang diinginkan.

1.5.2 Politik Uang

Politik uang diambil dari Bahasa Inggris yang artinya politik uang. Secara praktis hal itu juga biasa disebut suap. Politik uang merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi orang demi mencapai tujuan tertentu seperti kebijakan / jabatan / juga keputusan politik yang menggunakan nama rakyat sebagai kedok belaka. Dibalik itu, terdapat kepentingan kelompok/individu. Praktik itu dilakukan secara sengaja agar dapat mencapai sebuah tujuan partai, individu, maupun kelompok. Awal dari politik uang terlacak pada urusan politik—terutama aktivitas voting—yang melibatkan faktor ekonomi, partisipasi kolektif yang terorganisir, dan berbagai bentuk lain¹⁶.

Dalam skripsi kali ini, praktik politik uang sangat marak terjadi saat pemilu berlangsung. Khususnya dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat diberi tawaran sejumlah uang / barang untuk memilih paslon tertentu. Hal ini jelas menyalahi aturan pelaksanaan pemilu yang LuBeRJuDil (Langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Sebab, praktik politik uang mengancam hak masyarakat untuk bebas memilih. Beberapa masyarakat yang menerima tawaran tersebut akan tidak lagi objektif dalam menilai calon mana yang punya integritas untuk diberi kuasa dan kewenangan dalam mengatur desa.

Para pelaku politik uang tersebut biasa menyasar pada pemilih yang memiliki pengetahuan politik rendah dan cenderung labil. Manzetti dan Wilson dalam hal ini berpendapat bahwa masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik sejatinya merupakan sasaran bagi praktik politik

¹⁵ Mujani, S. *Kuasa Rakyat*. (Jakarta: Mizan, 2012). hlm. 43

¹⁶ Huntington, P. Samuel, J. N. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). hlm. 144.

uang Adapun strategi yang biasa dilakukan¹⁷. Yaitu sarana kampanye dan sembako politik. Dalam sarana kampanye masyarakat diminta hadir dengan menggunakan atribut paslon, seolah-olah memiliki banyak pendukung atau relawan. Usai acara masyarakat akan dilakukan politik uang berkedok uang transport.

Adapaun strategi lain seperti sembako politik, Mereka menysasar masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Taktik sembako politik pun digunakan. Tim pemenangan calon akan mengirimkan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, gula, sabun, telur dan lainnya secara berkala. Yang mana disetiap bingkisan tersebut terdapat gambar kampanye pada salah satu paslon. Taktik tersebut merupakan strategi yang efektif sebab memiliki sasaran yang tepat. Sehingga terdapat distribusi sumbangan, baik barang ataupun uang kepada berbagai pihak¹⁸.

Beberapa hal diatas tersebut menyalahi aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa tidak diperkenankan untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung. Politik uang kian dilakukan dengan bentuk-bentuk yang beragam agar tidak dapat terdeteksi oleh bawaslu. Mereka mencoba untuk sebisa mungkin menyembunyikan transaksi politik uang yang terjadi. Sebab, uang menjadi factor penting dalam mempengaruhi orang menggunakan hak pilihnya. Uang menjadi sarana yang ampuh untuk memaksakan kehendak pribadi dan kelompok pada pihak lain¹⁹. Tak hanya di desa, dalam lingkup pemilu yang lebih luas seperti pemilihan presiden, politik uang juga kerap dilakukan²⁰.

¹⁷ Luigi Manzzetti dan Carole J. Wilson, "Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support?", *Comparative Political Studies*, no. 40(8), Agustus 2007, hlm. 949-970.

¹⁸ Sumartini, *Agribisnis, Teori, dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 148.

¹⁹ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 95.

²⁰ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

Praktik politik uang tersebut akan menghasilkan fenomena yang bernama patronase dan klientelisme. Seperti yang dijelaskan oleh Aspinall dan Berenschot Klientelisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara dua pihak sedangkan patronase adalah pembagian keuntungan yang terjadi antara politisi dengan pihak lain yang membantu dalam meraih kemenangan pemilu²¹. Hubungan tersebut terjadi diatas kewenangannya dalam mengelola fasilitas negara yang hanya dipergunakan untuk kepentingan bisnis antar dua kelompok/individu, bukan masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat. Lebih lanjut lagi, Hasil daripada politik uang cenderung menghasilkan pejabat public yang korup.

1.5.3 Strategi Politik

Strategi adalah segala teknik dan cara untuk mencapai sesuatu tujuan. Jika dikaitkan dengan intepertasi politik oleh lasswell yang berkesimpulan bahwa politik adalah siapa mendapat apa kapan dan bagaimana²². Sehingga strategi politik adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai cita-cita politik. Hal ini begitu penting bagi para pelaku politik. sebab dalam mencapai tujuan, kemenangan ataupun kekuasaan diperlukan sebuah strategi yang dapat memberi perubahan. Kata strategi sendiri pun berawal dari kalangan militer. Dimana pada saat itu strategi sebagai kata yang muncul dalam topik-topik peperangan. Namun lambat laun waktu kata itu telah menyebar ke berbagai aspek. Salah satunya yaitu politik.

Dalam dunia politik, maka strategi tidak hanya terbatas pada persoalan menang dan kalah. Namun juga siapa mendapat apa kapan dan bagaimana. Bagi Schroder sendiri, strategi politik bertujuan untuk merebut kekuasaan, memperkaya diri, hingga mencapai tujuan-tujuan yang tersembunyi²³. Bagi Schroder sebuah strategi politik tidak seperti strategi peperangan yang mengejar kemenangan. Dalam strategi politik, perhatian mengenai siapa dapat apa sangat ditekankan.

²¹ Berenschot Ward dan Edward Aspinall, *Democracy for Sale*, (Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019)

²² Ramlan Surbakti. *op.cit.* hlm. 2.

²³ Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich-Naumann, 2009), hlm. 21.

Sehingga Schroder kemudian mengeluarkan 2 strategi politik yaitu ofensif dan defensif.

Perbedaan mendasar antara strategi ofensif dan defensif adalah ofensif dilakukan dikala partai politik ingin menambah pendukungnya. Sedangkan defensif, dilakukan ketika partai politik ingin mempertahankan mayoritas pendukungnya atau mundur dan berkoalisi dengan partai pemenang yang lain. Keduanya sama-sama merupakan strategi untuk mencapai keuntungan meskipun dalam strategi defensif partai justru bergabung koalisi dan meninggalkan ideologinya untuk keberlangsungan partai.

Dalam skripsi kali ini, Strategi ofensif merupakan salah satu yang cenderung diteliti. Sebab strategi ofensif dilakukan ketika ingin mendapat dukungan lebih atau membuat sebuah kebijakan baru. Hal-hal itu dapat tercapai dari pelaksanaan kampanye yang merupakan bagian dari strategi ofensif. Schroder memandang bahwa dalam strategi ofensif partai perlu memberikan penawaran yang benar-benar baru bagi masyarakat. Sebab target yang ingin diambil adalah orang-orang yang dulunya memilih partai lain. Sehingga partai harus tampil dengan gagasan yang baru dan berbeda.

Dalam mencapai strategi politik tersebut, setidaknya schroder telah menggagas beberapa langkah yang diperlukan demi berhasilnya strategi ofensif. Yang pertama partai harus tampil dengan visi dan misi yang lebih modern dan terbaru. Kedua, Perubahan itu harus tetap dapat diterima oleh pendukung lama, karena tujuan dari strategi ofensif adalah menambah dukungan bukan mengganti dukungan. Ketiga, keselarasan antara tiap individu dan partai dengan gagasan baru tersebut. Keempat, telah dipersiapkan isu-isu ringan mengenai kemunculan gagasan yang ingin ditampilkan. Sehingga tidak memberi efek kejutan yang justru membuat masyarakat keheranan dengan perubahan itu. Hal itu dapat dipersiapkan dengan program pengembangan SDM²⁴.

1.5.4 Pemilihan Kepala Desa

²⁴ Peter Schroder. *Op.cit.* hlm. 157.

Desa adalah pemerintahan terbawah yang memiliki hubungan paling dekat dengan masyarakat. Dalam proses Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), masyarakat dapat terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Bersama-sama mereka menentukan siapa pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mengelola desa tersebut di 6 tahun kedepan dengan maksimal 3 kali menjabat berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi dari sebuah pemerintahan desa. Dalam sebuah pemerintahan desa terdapat susunan lain seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa. Namun, keberadaan BPD tidak turut dipilih melalui pemilu. Itulah mengapa Pilkades jadi salah satu momen demokrasi yang sangat penting, karena kepala desa adalah pucuk tertinggi kekuasaan di sebuah desa dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Aturan mengenai pemerintahan dan kepala desa terdapat pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004. Dalam UU tersebut diatur mengenai kewenangan kepala desa hingga tugas dan kewajiban pemerintahan desa²⁵. Diantara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagaimana yang dituangkan tersebut kepala desa:

- 1). Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan desa;
- 2) menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Proses terjadinya pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan UU no. 6 Tahun 2014 pasal 31 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

²⁵ Undang-undang nomor 32 Tahun 2004

BPD memiliki peran yang krusial dalam proses pemilihan kepala desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 yang membahas tentang desa mengatakan bahwa BPD memproses pemilihan kepala desa dengan tenggat waktu paling lambat 4 (Empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa petahana³. BPD berwenang dalam membentuk panitia pemilihan yang diikuti oleh berbagai unsur masyarakat di desa. Disana, BPD menyeleksi dan menjaring siapa saja yang layak untuk dipertarungkan dalam proses pilkades kedepn. Kepala Desa diperbolehkan menjabat sebanyak dua kali untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa.

Adapun aturan kampanye yang diatur dalam Undang-undang yaitu proses kampanye dimulai selama-lamanya 6 hari masa kampanye dengan diikuti 2 hari masa tenang. Proses kampanye dapat dilaksanakan dengan penyampaian pendapat di tempat umum, atribut dan gambar di tempat umum. Kecuali di tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan dan lain-lain.

Pemilu berlangsung secara luberjurdil dan Calon kepala desa yang sah memenangkan pemilu adalah calon yang berhasil mendapatkan suara paling banyak. BPD kemudian mempunyai kewenangan untuk melaporkan kemenangan tersebut kepada bupati dan kepala desa terpilih akan disahkan langsung oleh bupati/walikota dengan tenggat waktu paling lama 15 hari dari diterimanya surat kemenangan pemilu tersebut.

1.6 Teori Klientelisme

Penelitian ini secara garis besar hendak menggunakan teori Klientelisme, yang dikemukakan oleh Edward Aspinall. Tak hanya itu, dalam teori tersebut juga terdapat argumentasi pendukung dan pijakan teori-teori sebelumnya yakni Patronase dan Patron Klien yang dituliskan oleh Hickens, Hutchcroft dan James Scott—para ilmuwan yang mempengaruhi Edward Aspinall. Sebelum menjelaskan tentang apa itu klientelisme, maka penulis akan menjabarkan latar belakang dari tergasnya teori klientelisme. Dalam Ilmu Politik, dimensi kekuasaan adalah unsur yang paling bisa menjelaskan seluruh fenomena politik terutama dalam penelitian yang melibatkan Pemilu dan Demokrasi. Secara umum, dalam sistem

demokrasi, kekuasaan secara institusional didapatkan melalui proses pemilu. Setiap kandidat yang bertanding akan melakukan segala cara untuk merebut kekuasaan dengan memperoleh dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya. Di berbagai negara yang memakai sistem demokrasi, biasanya terdapat penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, untuk keperluan memanifestasikan nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri—singkatnya agar rakyat dapat menggunakan hak pilih dan dipilih. Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini menggunakan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin di berbagai ranah, dari nasional, daerah, hingga lingkup terkecil sekalipun. Tepat akhir tahun 1990-an, terdapat konsolidasi demokrasi yang kerap disebut sebagai reformasi sistem politik Indonesia. Perombakan sistem tersebut memungkinkan Pemilihan Umum diselenggarakan secara umum dan terbuka 5-6 tahun setelah reformasi terjadi, tepatnya tahun 2004 yakni pemilihan umum Presiden atau Pilpres, dan disusul dengan Pemilihan umum Kepala Daerah dari Gubernur hingga Bupati atau Walikota pada tahun 2005. Untuk lingkup terkecil, juga terdapat pemilihan yang mekanismenya cukup berbeda dengan pemilihan umum di tingkat daerah maupun nasional, yakni Pilkades.

Kontestasi dalam Pemilihan Umum dalam penelitian sejumlah sarjana menjadi fenomena yang menarik di era mutakhir, sebab problematikanya semakin kompleks dan banyak distorsi yang butuh penelitian lebih lanjut untuk mengungkapkannya secara akademis. Dalam kontestasi ini terdapat pelbagai strategi yang digunakan para politisi atau bagian dari masyarakat yang mengajukan diri menjadi kontestan dalam pemilihan umum. Dari strategi menarik pemilih dengan cara bersosialisasi, memanfaatkan karisma, jejaring, pembuatan program, menggunakan identitas, atau dengan memberi serta mendistribusikan materi demi menarik minat pemilih. Istilah yang diberikan, menurut Aspinall adalah politik uang. Istilah ini meski masih sangat sempit dipahami oleh masyarakat sebagai aktivitas suap, atau tindakan pemberian barang atau uang yang secara sadar dilakukan kontestan memanfaatkan kekayaan sebagai salah satu faktor penentu

memenangi pemilu.²⁶ Politik uang akhirnya menjadi permasalahan yang pelik dalam sistem demokrasi ideal, yang menyebabkan proses pemilu tidak *fair* dan jauh dari prinsipnya. Dari politik uang, berkembang fenomena yang disebut patronase, yang diartikan sebagai relasi antara pemberi manfaat (uang/materi lain) dengan yang diberi dalam konteks pemilu maupun proses demokrasi yang lebih luas. Mengapa demokrasi dan pemilu? Karena dalam banyak studi, politik uang kerap dilakukan untuk menarik pemilih untuk memilih siapa yang akan dipilih, dan sejauh ini, sistem demokrasi yang paling dapat mendorong untuk terselenggaranya kegiatan pemilihan umum.

Patronase terjadi antara dua belah pihak, yang oleh James Scott disebut patron dan klien. Salah satu praktik yang kerap kali dilakukan oleh politisi di Indonesia untuk memenangkan pemilu adalah praktik patron klien. Patron klien adalah sebuah kondisi dimana terdapat dua pihak dengan kedudukan yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya²⁷. Patron klien melibatkan politisi dengan pemilih atau pendukung untuk melakukan transaksi demi mencapai tujuan politik tertentu. Adanya aspek politik transaksional menjadi salah satu ciri dalam patron klien. Salah satu contohnya adalah politik uang. Politisi memberikan uang kepada pemilih dan mengharapkan dukungan politik sebagai balasannya.

Aspinall dalam bukunya yang berjudul “Politik Uang di Indonesia” menekankan bahwa patronase dan klientelisme memiliki konsep yang berbeda. Patronase lebih menekankan bagaimana transaksi materil yang terjadi antara politisi dengan pemilih atau pendukung tersebut berjalan dan mampu memenangkan pemilu. Sedangkan klientelisme lebih menekankan pada aspek

²⁶ Edward Aspinall, Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta. Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM, 2015) hlm. 2

²⁷ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta. LP3S, 1983) hlm. 14 dan David Jarry, *Dictionary of Sociology*, (London. Harper-Collins Publishers, 1991) hlm. 458.

terbentuk dan terpeliharanya relasi tersebut dalam ranah politik²⁸. Hicken dalam Aspinall²⁹ menyebut bahwa terdapat 3 hal yang terkandung dalam klientelisme. Yang *pertama* yaitu, kontingensi atau timbal balik. Adanya pertukaran barang dan jasa dengan dukungan politik yang biasa berbentuk suara atau dukungan politik lainnya. *Kedua*, hierarkis. Dimana terdapat dua pihak dengan kedudukan yang tidak sederajat. Salah satu pihak menerima tekanan dari pihak yang lain. *Ketiga* adalah pengulangan. Di mana transaksi yang dilakukan tersebut berlangsung secara kontinue dan berulang.

Ward mengungkapkan bahwa dalam kemenangan pemilu, klientelisme merupakan dimensi informal yang turut mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan³⁰. Dimensi informal yang dimaksud adalah bagaimana politik transaksi yang terjadi dibelakang layar tersebut terbentuk dan terpelihara. Lebih lanjut, politik transaksi merupakan sebuah relasi kekuasaan yang personalistik³¹. Ward menganggap transaksi yang didasarkan pada kepentingan individu tersebut tercipta akibat lemahnya pengaruh partai politik dalam pelaksanaan pemilu. Dimana masing-masing calon perlu membentuk tim kampanye sendiri sehingga ikatan patron klien yang terbentuk didasarkan pada kepentingan individu. Hal yang berbeda terjadi di India dan Argentina, ikatan patron klien di dua negara tersebut hanya terjadi di lingkup partai politik sebab, partai telah menyediakan tim kampanye bagi masing-masing calon. Sehingga, control dan kuasa tim kampanye berada di tangan partai. Bargain yang terbentuk pun terjadi antara partai politik dengan sang klien. Contoh mudah dalam kasus ini adalah adanya sokongan dana dari pengusaha kepada salah satu paslon dan mengharap kontrak kerjasama sebagai balasannya apabila menang. Hal ini menunjukkan bahwa klientelisme yang terbentuk dapat memiliki media transaksi yang beragam. Keragaman media transaksi dalam klientelisme tersebut dapat berupa janji pekerjaan, perizinan,

²⁸ Edward Aspinall, Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta. Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM, 2015) hlm. 4.

²⁹ *Ibid.* hal.4.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Paul Hutchcroft, *Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and Philippines* dalam Aspinall dan Sukmajati *op.cit.* hlm. 5.

kontrak, hingga transaksi yang menggunakan layanan publik dari negara. Seperti contoh melalui program bantuan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Praktik patronase juga memiliki beragam bentuk dalam operasionalnya, yang mana dibedakan melalui cara yang digunakan untuk mengartikulasikan pertukaran kepentingan serta bentuk ‘manfaat’ apa yang dipertukarkan. Di antaranya adalah, *vote buying*, *pork barrel*, *club goods*, *individual gifts*, dan bentuk khusus ketika kandidat memberikan janji kepada *broker* atau anggota tim sukses keuntungan yang bersifat lebih berkelanjutan seperti pekerjaan atau akses terhadap proyek-proyek pemerintahan. Menganut definisi yang dipakai oleh Aspinall dan Sukmajati, *vote buying* atau pembelian suara dimaknai sebagai distribusi uang tunai/barang dari kandidat kepala pemilih dalam beberapa hari menjelang pemilihan yang disertai harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Menarik dari temuan di lapangan bahwa, *vote buying* ini berlangsung dengan semacam akad jual beli secara eksplisit, dimana kandidat memberi uang dan penerima berkeharusan untuk memilihnya. Sedangkan *pork barrel* merupakan program yang dibuat sebagai proyek oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi para pendonor swasta dalam konteks tukar-guling kepentingan. *Pork barrel* jelas merugikan dan sama sekali berbeda dengan *programmatic goods* yang misalnya memiliki prinsip keadilan secara universal, contohnya program kesehatan gratis untuk orang miskin—prinsip ini tidak digunakan dalam *pork barrel* yang terjadi akibat klientelisme. Selain kedua hal yang paling problematik, bentuk klientelisme juga berupa pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, dan *club goods*. *Club goods* hampir sama dengan *pork barrel*, namun berbeda subyek penerima sebab *club goods* diperuntukkan menguntungkan komunitas sosial tertentu yang terlibat dalam kemenangan pemilu.

Persoalan Klientelisme, menurut hemat peneliti butuh diteliti secara berkelanjutan sebab fenomena ini merupakan distopia dalam demokrasi, yang mana, pertama, tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat—dengan kata lain, jika klientelisme yang dilandasi dengan unsur material, maka rakyat yang lemah secara material tidak dapat mengikuti proses demokrasi secara normal, andaikan, dalam sistem yang marak praktik

klientelisme, mereka yang mencalonkan diri sebagai yang dipilih akan bergantung kepada pihak yang memiliki uang dan tentunya ini akan melanjutkan klientelisme jenis lain lagi. Kemudian, apabila rakyat sebagai pemilih, tentu tidak akan bisa mendapatkan pemimpin yang paling baik—sebab klientelisme memungkinkan pemilih akan lebih tertarik pada politisi yang memiliki manfaat secara material ketimbang mereka yang memiliki program bagus. Kedua, klientelisme merupakan transformasi yang hingga kini terus berkembang, yang mana membuat proses demokrasi semakin keruh. Klientelisme juga memungkinkan terpeliharanya tindakan koruptif pejabat terpilih karena mereka sejak awal fokus terhadap klien dan bagaimana mengembalikan modal pemilu, bukan fokus menjalankan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka secara menyeluruh dan adil.

Patron-klien dinilai sebagai produk sosial-budaya di mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu patron memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya klien³². Keragaman klientelisme bergantung pada diversifikasi ekonomi daerah. Apabila suatu daerah ekonominya bergantung pada satu sector maka akan semakin meningkatkan potensi praktik klientelisme. Salah satu hasil penelitian yang ia lakukan menunjukkan bahwa kondisi daerah Kupang, NTT yang memiliki tingkat diversifikasi ekonomi yang rendah berbanding lurus dengan masifnya praktik klientelisme yang dilakukan. Efek domino yang ditimbulkan akibat masifnya kegiatan klientelisme adalah adanya potensi konflik sosial yang terjadi usai pelaksanaan pemilu. Seperti kelompok pendukung salah satu paslon yang tidak terima dengan hasil pemilu dan meminta untuk mengajukan pemilihan ulang. Beberapa konflik sosial juga hadir dengan corak premanisme dan anarkisme. Menurut Ward, hal tersebut terjadi karena besarnya ketergantungan para pendukung terhadap hasil pilkada yang pada akhirnya turut mempengaruhi sisi emosional tiap-tiap individu. Kelanjutan hidupnya sangat bergantung pada deal-deal politik yang disepakati antara pendukung dengan kandidat.

³² Muhtadi, B. *Politik Uang dan Dnamika Elektoral di Indonesia*. (Jurnal Penelitian Politik).

Secara tidak langsung, klientelisme juga menjelaskan mengapa ongkos politik begitu mahal dan maraknya praktik korupsi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan mengakarnya budaya patron klien yang telah dilakukan sejak Tahun 1998 hingga saat ini. Politisi yang mencalonkan diri terpaksa untuk turut berlomba-lomba dalam mengeluarkan uang untuk membeli dukungan politik melalui suara masyarakat. Alhasil, usai politisi tersebut terpilih maka akan sibuk mencari balik modal melalui sumber kekayaan dan kekuasaan negara³³.

Menurut Aspinall, praktik ini tidak hanya terjadi di struktur formal, seperti partai politik, melainkan juga di struktur informal di luar partai politik yang melibatkan tim sukses, birokrat, hingga struktur masyarakat sipil paling bawah yaitu RT dan RW³⁴. Jejaring non partai menjadi sebuah sumber daya yang mampu memberikan dukungan lebih dalam kampanye pemilu. Ward menjelaskan bahwa terdapat 2 jaringan yang terbentuk ketika kandidat mencalonkan diri dalam pemilu. Yang pertama yaitu dibentuknya tim sukses bentukan calon serta dibentuknya jejaring formal dan informal yang menyusup langsung pada pemilih berdasarkan kriteria agama, etnisitas, pendidikan, strata ekonomi dan lain-lain. Kondisi juga dapat menjadi boomerang bagi kandidat itu sendiri apabila ia tidak dapat menyeimbangkan pembagian keuntungan antara tim sukses dengan jejaring yang lain. Tak jarang terjadi pengkhianatan dalam proses berjalannya hal tersebut.

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimanakah kemenangan pilkades di Desa Ngabetan, dan dengan kontestasi politik paslon M.Taufiq, serta bagaimana kinerja strategi kemenangan para tim sukses dalam memperjuangkan calon yang telah di usung sehingga dapat memperoleh suara terbanyak dan menjadi pemenang pilkades di Desa Ngabetan.

1.7.2 Jenis Penelitian

³³ Berenschot Ward dan Edward Aspinall. *Op.cit.* hlm. 250.

³⁴ *Ibid.*

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yaitu memiliki sebuah tujuan untuk membuat sebuah deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat berkenaan dengan sebuah fakta-fakta dan sebuah sifat populasi maupun daerah.

Penelitian jenis deskriptif sendiri sebuah jenis yang mengkaji dan mengetahui sebuah fenomena-fenomena ataupun sebuah perubahan terhadap aktivitas atau satu kejadian. Penelitian deskriptif sendiri tidak hanya dipergunakan didalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif tetapi juga dapat digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan sebuah deskriptif secara sistematis yang berdasarkan dari temuan di lapangan agar bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan peneliti dalam penelitian ini³⁶

1.7.3 Subyek

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang nantinya akan memberikan informasi/data yang terkait dengan problem penelitian dan fokus penelitian. Subyek penelitian ialah pihak-pihak yang terlibat pada pemberian sebuah dukungan ataupun yang memperoleh dukungan sekalipun. Subyek yang akan menjadi fokus pendukung masalah adalah:

1. Peserta Pemilihan Kepala Desa
2. Tokoh Masyarakat desa Ngabetan Kabupaten Gresik
3. Tokoh Pemuda (Karang Taruna) desa Ngabetan Kabupaten Gresik
4. Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
5. Perangkat Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
6. Perwakilan Tim pemenangan Kepala Desa Ngabetan Kecamatan Cerme

1.7.4 Lokasi Penelitian

³⁵ Asep Saepul Hamdi – E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm 5.

³⁶ Aminah, S. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

Penelitian mengenai pemenangan pilakdes yang terkait dengan kontestasi politik ini dilaksanakan di Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagai lokasi dilaksankannya atau tempat sasaran pelaksanaan pilkades secara langsung yang memikat untuk dikaji bagi Kepala Desa Terpilih.

1.7.5 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian strategi pemilihan kepala desa ini sebagai berikut:

1. Data Primer, `Sumber data yang akan didapatkan oleh peneliti diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan dengan informan, informan yang disebutkan adalah informan yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Data primer yang didapatkan hasil wawancara dari tokoh peserta pemilihan Kepala Desa (Sunadi, Ali MAsudi, M. Taufiq), tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, BPD desa Ngabetan, dan tim pemenang masing-masing peserta Kepala Desa.
2. Data Sekunder, Penelitian ini menggunakan data skunder untuk mengkaji hasil-hasil perolehan data dari wawancara dengan informan secara langsung, karena sumber data skunder adalah sebuah perolehan data dari dokumen-dokumen yang sangat relevan dengan tema dan pengumpulan data dari wawancara secara langsung bersama informan dalam penelitian ini. Data skunder yang mendukung dan menunjang data primer meliputi kondisi wilayah, kondisi penduduk, kondisi permasalahan kesejahteraan sosial dan sarana prasarana.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sebuah langkah yang sangat utama pada penelitian, tujuan dari pengumpulan data sendiri untuk mendapatkan data-data yang sangat akurat dan mendukung hasil penelitian, apabila tanpa adanya pengetahuan teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan bisa menghasilkan data yang akurat ataupun sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Adapun suatu teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Wawancara

Wawancara ialah salah satu dari beberapa cara dalam mendapatkan data ataupun informasi. Wawancara merupakan sebuah cara yang dibutuhkan oleh seorang peneliti untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.³⁷

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan sebuah peristiwa yang telah usai atau berlalu. Dokumentasi bisa memiliki bentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi yang memiliki sebuah bentuk tulisan misalnya catatan harian, ceritera, biografi, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya sebuah foto, sketsa, gambar kehidupan, dan lain sebagainya. Dokumen yang memiliki bentuk karya seperti karya seni, yang merupakan sebuah gambar, film, patung dan sebagainya. Studio dokumen ialah sebuah perlengkapan dari fungsi metode observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau bisa membuktikan fakta yang ada apabila didukung oleh foto-foto ataupun karya tulis akademik dan seni yang sudah ada. Maka dari itu peneliti menggunakan sebuah media cetak, media elektronik untuk mendukung dan bahan bukti data yang sesuai fakta.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis data kualitatif. Sebagai penelitian yang deskriptif dan menggunakan cara wawancara dan data dokumen pemerintah, ini merupakan bentuk dari analisis kualitatif. Analisis data kualitatif sendiri merupakan proses analisis yang mendasarkan pada hubungan semantis antar subyek sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

³⁷ Fendi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016) hlm 1-2.

1. Reduksi Data

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sampai mendapatkan kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data primer yang memiliki kaitan dengan politik uang, strategi politik, reputasi, dan jejaring yang ada dalam pemetaan politik di Desa Ngabetan. Khususnya dalam konteks pemilihan kepala Desa Ngabetan di Tahun 2019.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Bentuk penyajian data ini berbentuk teks naratif yang menjadi catatan lapangan. Sehingga memberi kemungkinan untuk mendapatkan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menyajikan data berdasarkan teori klientelisme yang ditulis oleh Edward Aspinall dan Berenschot Ward. Dalam teori itu, peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan strategi, alur, dan proses terbentuknya jaringan klientelisme di Desa Ngabetan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan bertujuan mencari bentuk hasil dari penelitian dan penemuan data-data yang ada.

BAB II

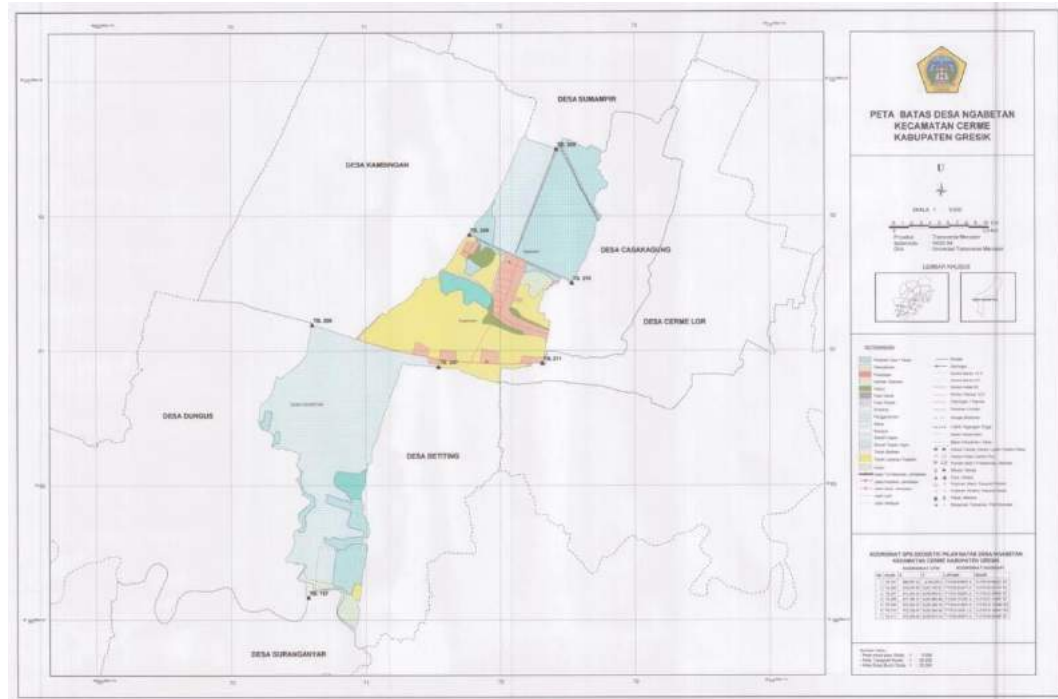
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Singkat Desa Ngabetan

Desa Ngabetan memiliki total luas sebesar 282,34 ha batas wilayah Desa Ngabetan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Semampir, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cagak Agung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kambingan, dan sebelah selatan Desa Betiting. Sebesar 12,311 ha wilayah Desa Ngabetan dipergunakan sebagai lahan persawahan dan 90,515 ha dipergunakan sebagai wilayah tambak, lahan yang dipergunakan sebagai pemukiman sebesar 176,014 ha, 0,5 ha dipergunakan sebagai lahan perkantoran dan 3 ha dipergunakan sebagai Makam dan lapangan. Desa Ngabetan bisa disebut dengan desa pertanian dan terbagi 8 wilayah yaitu, Dusun Ngabetan, Dusun Kejambon, Dusun Sukorejo, Perum Bumi Cermi Apsari, Perum Patra Raya, Perum Queen Recidency, Perum Graind Nirwana dan Perum Cerme Squer.

Penduduk Desa Ngabetan menurut data yang diperoleh dari Instrument Pendataan Profil Desa sejumlah 4.055 jiwa. Jumlah penduduk yang ada di Desa Ngabetan akan sering mengalami sebuah perubahan dari total penduduk, bisa didasari dengan adanya penduduk yang meninggal dunia atau dengan kelahiran, adanya penduduk yang berpindah domisili, dan juga bisa didasari dengan adanya perpindahan penduduk baru dari wilayah lain yang ingin tinggal di Desa Ngabetan sehingga mempengaruhi jumlah total penduduk yang tinggal di Desa Ngabetan.

Penduduk Desa Ngabetan sebagian besar bermata pencahariannya ialah pedagang dan petani. Dan ada 253 kepala keluarga miskin.



Gambar 1. Peta wilayah Desa Ngabetan



Gambar 2. Wilayah Desa Ngabetan

2.2 Sejarah Desa

Desa Ngabetan memiliki arti nama tersendiri yakni, Ngabetan berasal dari Bahasa Jawa “Ngabekti Tenana” atau bisa diartikan dengan Bahasa Indonesia ialah “berbakti dengan sungguh-sungguh” yakni secara singkatnya ialah mengabdikan, tunduk. Tujuan dari ngebakti ialah berbakti kepada Allah SWT, orang tua, serta Nusa dan bangsa.

Desa Ngabetan mempunyai 3 dusun yaitu Ngabetan, Kejabon dan Sukorejo, desa ini mulanya tidak memiliki sebuah nama. Dalam kondisi tersebut, seseorang yang ada di desa Ngaebetan yakni biasa disebut Mbah Ronggo yakni seseorang yang dipercaya sebagai pendiri desa Ngabetan, mengirim salah satu putranya guna menghadap kepada Sunan Giei yaitu Syeh Ainul Yaqin, di kerajaan Giri pada saat itu. Oleh Sunan Giri sendiri memberikan sebuah nama Ngabetan kepada desa yang didirikan oleh Mbah Ronggo, nama tersebut diharapkan agar penduduk desa menjadi warga yang beriman dan berbakti kepada sang pencipta.

Dari 3 dusun yang ada di desa Ngabetan memiliki sejaran tersendiri yakni dusun Kejabon, dusun tersebut dahulu berlokasi yang diampit oleh desa Betiting dan desa Gugus tetapi lokasi tersebut rawan akan tindak kriminal yakni sering terjadi sebuah perampokan, sehingga warga yang tinggal di Kejabon berharap kepada warga Ngabetan untuk memberikan bantuan. Akhirnya Kejabon dipindahkan ke lokasi yang bersebelahan dengan dusun Ngabetan. Selanjutnya dusun Sukorejo, dusun ini dahulunya bernama dusun Bendung. Nama tersebut awalnya dari sebuah waduk yang membendung suatu aliran, tetapi secara tiba-tiba waduk tersebut tidak bisa membendung aliran dan mengakibatkan kerusakan yang mengakibatkan banjir, banjir tersebut meluap dan membanjiri dusun Sukorejo dan sekitarnya. Pada saat adanya banjir dari bendungan tersebut muncul sesosok orang yang sakti dan menancapkan sebuah benda yang akhirnya banjir tersebut surut dan membuat bendungan itu tidak rusak lagi. Dengan kejadian yang telah terjadi dusun tersebut akhirnya berganti nama dari dusun Bendung menjadi dusun Sukorejo nama tersebut diubah pada tahun 1989. Nama yang telah diberikan diharapkan dapat memberikan sebuah kebahagiaan dan yang lebih utamanya ialah hasil panen yang sangat melimpah pada dusun Sukorejo tersebut sehingga warga yang tinggal di desa tersebut akan bergembira selalu.

Zaman dahulu desa Ngabetan identik dengan sebuah pendidikannya serta dengan bercocok tanamnya. Desa Ngabetan juga mempunyai waduk atau bisa disebut dengan bendungan yang memiliki bentuk menyerupai gajah tetapi asal usul dari terjadinya bentuk tersebut tidak diketahui asal usulnya hingga sekarang.

2.3 Keadaan dan Perkembangan Penduduk

Penduduk ialah salah satu hal yang sangat penting bagi pembangunan, karena penduduk ialah sebuah objek dan sekaligus untuk menjadi subjek dalam pembangunan. Penduduk diartikan sebagai subjek yakni memiliki arti bahwa penduduk menjadi pelaku bagi pembangunan yang akan dilakukan. Penduduk yang diartikan sebagai objek yaitu penduduk yang menjadi tujuan dari pembangunan, yaitu membangun manusia yang ada.

Jumlah penduduk desa Ngabetan pada akhir tahun 2019 ialah 4.055 Jiwa dengan 1042 kepala keluarga, dan jika dirinci dari jenis kelamin yaitu penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.007 jiwa sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.048 jiwa. Dusun yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi ialah Dusun Ngabetan, sedangkan yang paling rendah ialah Perumahan Patra Raya.

Berdasarkan data keadaan penduduk, yaitu dari hasil pendataan jumlah penduduk menurut Kelurahan, jenis kelamin 2019 adalah 4.055 jiwa yang terdiri dari:

- Laki-laki : 2.048 Jiwa
- Perempuan: 2.007 Jiwa

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan wilayah, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Wilayah dan Jumlah Penduduk di Desa Ngabetan

No	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun Ngabetan	860	855	1715
2	Dusun Kejambon	376	326	702
3	Dusun Sukorejo	136	150	286
4	Perum BC Apsari	401	402	803
5	Perum Queen Rec.	79	92	171
6	Perum Petra Raya	85	72	137
7	Perum Graind Nirwana	0	0	0
8	Perum Cerme Square	0	0	0

Sumber: Kantor Kelurahan Desa Ngabetan

Berdasarkan tabel 1. di atas, dapat dilihat desa yang memiliki penduduk tertinggi ialah dusun Ngabetan, dengan tingkat penduduk sebesar 1715 jiwa, sedangkan tingkat penduduk paling rendah terdapat pada wilayah Perum Petra Raya.

2.3.1 Agama

Selain terdiri dari berbagai golongan masyarakat desa Ngabetan juga terdiri dari berbagai agama. Untuk lebih jelas terkait unsur-unsur masyarakat desa Ngabetan berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Ngabetan

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	3920
2	Kristen Katolik	29
3	Kristen Protestan	99
4	Hindu	7
5	Budha	0
6	Kepercayaan lain	0

Sumber: Kantor Kelurahan Desa Ngabetan

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat dilihat penduduk Desa Ngabetan mayoritas menganut Agama Islam dengan jumlah 3920 orang. Sedangkan masyarakat yang minoritas adalah masyarakat yang beragama Hindu yakni dengan jumlah 7 orang.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Ngabetan

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	159	142	301
2	5-9	213	155	368
3	10-14	171	188	359
4	15-19	170	170	340

5	20-24	143	134	277
6	25-29	143	126	269
7	30-34	131	153	187
8	35-39	180	187	367
9	40-44	185	179	317
10	45-49	153	164	317
11	50-54	119	131	250
12	55-59	118	89	207
13	60-64	65	63	128
14	65-69	44	46	90
15	70-74	27	18	45
16	75-- -	27	62	89
Jumlah Total		2048	2007	4055 jiwa

2.3.2 Mata Pencaharian

Penduduk desa Ngabetan memiliki mayoritas mata pencahariannya ialah sebagai pedagang. Mayoritas masyarakat bergantung hidup terhadap pekerjaan sebagai pegawai pabrik dan pedagang. Didukung dengan adanya gudang-gudang dan perusahaan yang berdiri di wilayah desa Ngabetan. Untuk lebih jelasnya terkait mata pencahariaan penduduk desa Ngabetan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Ngabetan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	104
2	Pedagang	253
3	Supir	21
4	PNS	50
5	TNI	30
6	POLRI	1
7	Sektor Industri	1204

8	Sektor Lain	1326
Jumlah (Jiwa)		2989

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat desa Ngabetan mayoritas bermata pencaharian di sektor industry yaitu sebanyak 1204 , hal ini didukung dengan keadaan desa yang memiliki pendatang untuk mendirikan usaha mereka di wilayah desa tersebut, sedangkan banyak lahan-lahan yang di beli oleh orang asing untuk dijadikan industry.



Gambar 3. Industri di Desa Ngabetan

2.4 Keadaan Politik dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngabetan

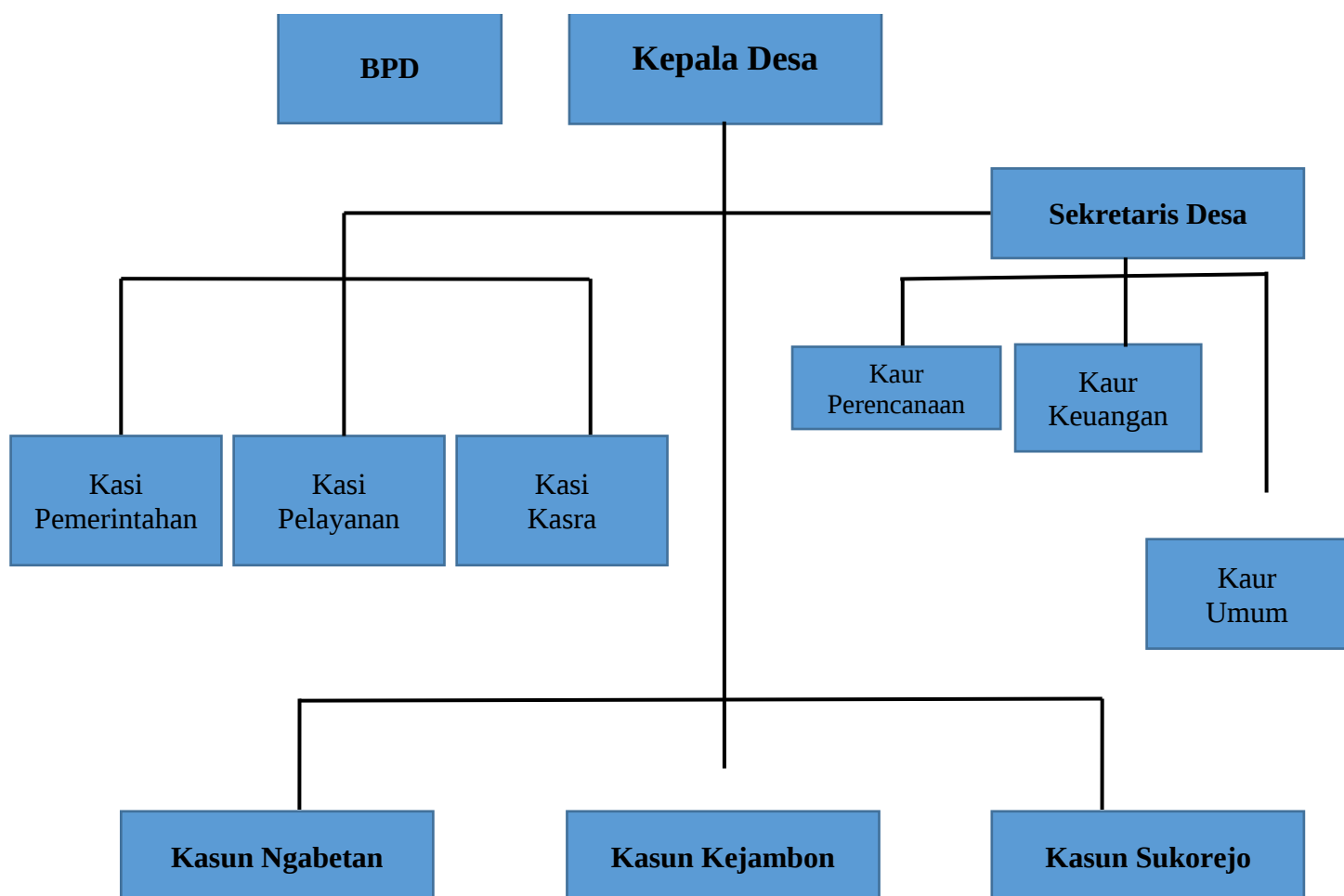
2.4.1 Keadaan politik

Keadaan politik masyarakat desa ngabtean terbilang cukup baik dengan adanya dasar penilaian yang memperlihatkan bahwasannya masyarakat desa ngabetan ikut serta dan bergotong royong untuk menjalankan demokrasi di desa ngabetan, hal tersebut tertuang dalam pemilu yaitu meliputi pilkada dan pelaksanaan pemilihan kepala desa disetiap priodenya. Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam pemilih tetap atau bisa disebut dengan DPT adalah sebanyak 2546 jiwa, jumlah tersebut dapat dikategorikan dengan jumlah masyarakat yang aktif

dalam kegiatan politik di desa Ngabetan. Tetapi yang harus di ketahui ialah adanya pertumbuhan partisipasi masyarakat yang tertuang dalam partisipasi politik tak luput dengan adanya latar belakang permainan uang yang tumbuh di masyarakat desa, karena sebagian besar masyarakat menjalankan partisipasi politik didasari dengan adanya money politic untuk memilih pemimpin mereka. Ada pula masyarakat yang ingin di pimpin oleh pemimpin yang memiliki standar kualitas yang tinggi dan tepat untuk memimpin mereka, tetapi sebagian orang pula mengharapkan imbalan untuk memilih pemimpinnya entah itu uang ataupun jabatan.

2.4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngabetan

Bagan SEQ Bagan * ARABIC 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngabetan



Tabel 5. Pejabat Pemerintahan Desa Ngabetan

No	Nama	Jabatan
1	Muchamad Taufiq	Kepala Desa
2	Isnawarin Aholikhah	Sekretaris Desa
3	Amari	Kasi Pemerintahan
4	Umu Alfiah	Kaur Keuangan
5	Endang Sulastrri	Kaur Umum dan tata Usaha
6	Detty R. Purbasari	Kaur Perencanaan
7	M. Bahaiqi Matemo	Kasun Ngabetan
8		Kasun Kejambon
9	Mulyadi	Kasun Sukorejo
10	Cholishotun Naimah	Kasi Kesra
11	Imam Rifa'i	Kasi Pelayanan

Tabel 6. Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngabetan

No	Nama	Jabatan
1	Nrali	Ketua
2	Ahmad Suyudy	Anggota
3	Masyhadi	Anggota
4	Nursyahid	Anggota
5	Vina Vebryanti	Anggota
6	Idrus Subarkah	Anggota

7	Eko Sris Susanto	Anggota
8	Ali Sugiarto	Anggota
9	Minton Sitohang	Anggota

Tabel 7. Nama LPMD/LKD Desa Ngabetan

No	Nama	Jabatan
1	Roisul Hadi	Ketua
2	Arifin	Wakil Sekretaris
3	Moch. Arif	Sekretaris
4	M. Wakhid	Bendahara
5	Abd. Rahman Fauzi	Anggota
6	Suwito	Anggota
7	Ainul Rofik	Anggota
8	Darminto	Anggota

Tabel 8. Kepala Desa yang pernah menjabat

Munardi	Tahun (1920-1919)
H. Mansur	Tahun (1940-1950)
H. Tampang	Tahun (1951-1963)
H. Khasan N	Tahun (1964-1990)
H. Isa Idris	Tahun (1991-1998)
Suhartono	Tahun (1998-2006)
Ali Mashudi	Tahun (2007-2013)

Drs. Sanadi,S.Pd	Tahun (2013-2019)
------------------	-------------------

2.5 Fasilitas Desa Ngabetan

2.5.1 Bidang Keagamaan

Keberadaan sarana peribadahan menjadi kebutuhan primer masyarakat desa. Dalam hal ini, mayoritas penduduknya merupakan beragama Kristen dan Islam. Dua kepercayaan tersebut telah memiliki tempat peribadahan yang layak di Desa Ngabetan. Dana pemerintahan desa menjadi sumber utama biaya pembangunan tempat ibadah, Namun, untuk biaya renovasi juga dapat sumbangan dari warga desa. Salah satunya adalah Pak taufiq sendiri yang merupakan kepala desa saat ini sempat membantu biaya penyewaan bego untuk merobohkan bangunan masjid di Dusun Ngabetan yang akan di renovasi. Sedangkan pembangunannya dibantu dengan tenaga masyarakat desa.

Tabel 9. Jumlah Fasilitas Keagamaan

No	Fasilitas Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	5
3	Gereja	1
Jumlah		10

2.5.2 Bidang Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan fasilitas yang harus diperlukan untuk proses pembelajaran baik pendidikan bergerak maupun tidak bergerak agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang berjalan dengan baik, efektif, lancar dan teratur. ³⁸ desa pendidikan sangatlah dibutuhkan, agar tidak jauh-jauh masyarakat desa untuk menempuh pendidikan ke kota, sehingga fasilitas pendidikan yang dimiliki desa Ngabetan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

³⁸ Suharsimi Arikunto dan LiaYuliana, *Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 2008)* hlm. 273

Tabel 10. Jumlah Fasilitas Pendidikan

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	MADIN	1
4	SD	1
5	SLTP	-
6	SLTA	1
Jumlah		5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas dalam bidang pendidikan di desa Ngabetan sudah memadai untuk dapat menunjang peningkatan pendidikan masyarakat di desa Ngabetan.

2.5.3 Bidang Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di desa memanglah instrument yang paling penting bagi masyarakat desa, karena dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada di desa dapat mengukur tingkat kesehatan masyarakat dan bahkan dapat mengukur sebuah kesejahteraan masyarakat. Fasilitas bidang kesehatan yang ada di desa Ngabetan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	5
2	Ponkesdes	1
Jumlah		6

Fasilitas kesehatan desa Ngabetan yang dapat di lihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang dimiliki desa tergolong kurang memadai, dengan adanya fasilitas kesehatan yang kurang memadai ini akan mengganggu atau menghambat laju kesejahteraan masyarakat desa Ngabetan.

2.5.4 Bidang Olahraga

Desa Ngabetan menyediakan fasilitas kebutuhan olahraga yang cukup memadai bagi warganya. Fasilitas pembangunan tempat olahraga tersebut dibangun melalui dana pemerintahan desa. Namun dalam hal perlengkapan peralatan olahraga dibantu secara swadaya oleh masyarakat. Pak Taufiq menjadi salah satu orang yang memberi bantuan cukup besar dalam pemenuhan peralatan olahraga tersebut. Hal itu disebabkan oleh kedekatannya dengan Karang Taruna desa yang menjadi pengurus perawatan fasilitas olahraga tersebut.

Tabel 9. Jumlah Fasilitas Olahraga

No	Fasilitas Olahrag	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Futsal	1
3	Lapangan Voli	1
Jumlah		3



Gambar 4. Lapangan Olahraga di Desa Ngabetan

2.7 Profil Kepala desa Terpilih

Kepala Desa Ngabetan yang terpilih di tahun pemilihan 2019 adalah Muchammad Taufiq. Taufiq adalah pendatang baru dalam kandidat pemilihan kepala desa dan Taufiq langsung terpilih di tahun tersebut melawan dua calon kepala desa yang merupakan petahana. Secara usia, Taufiq merupakan calon yang paling muda saat itu. Latar belakangnya yang hanya seorang wirausaha di bidang pertanian dan pertambakan membuatnya mampu memenangkan pilkades.

Tabel 10. Profil kepala Desa Ngabetan

Nama	Muchamad Taufiq
Tempat Tangga Lahir	Gresik, 5 Maret 1988
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
Status	Menikah
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat	Ds. Ngabetan 02/03 Cerme Gresik

2.8 Pilkades Desa Ngabetan Tahun 2019

Pilkades desa Ngabetan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019, pilkades ini merupakan pilkades serentak yang diadakan kabupaten Gresik, pilkades ini merujuk pada pasal 154 peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 yang sudah di ubah dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan perda Nomor 12 tahun 2015 yang diubah dengan Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa.

Berlangsungnya pilkades di desa Ngabetan sama saja dengan desa-desa lainnya, yakni dengan adanya tradisi sebelum pelaksanaan pilkades yaitu anak-anak muda yang menjaga ketertiban masyarakat dalam berlangsungnya pilkades, dengan mendirikan pos-pos di sudut desa hingga tengah malam banyak masyarakat yang berkumpul di pos tersebut agar dapat melihat kondisi desa yang harus tertib dalam pelaksanaan pilkades, dan kandidat memberikan sebuah makanan ringan seperti jajanan kering, kopi dan lain-lain untuk berkumpul di pos-pos tersebut.

Pada tanggal 30 juli 2019 hari rabu, di desa Ngabetan kecamatan Cerme melaksanakan pemilihan kepala desa dan pelaksanaan perhitungan suara perhitungan suara dilaksanakan dengan berikut:

1. Penghitungan surat suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai pada tanggal 30 Juli 2019
2. Penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 14.05 sampai dengan 18.20 WIB.
3. Penghitungan suara dilaksanakan di tempat terbuka yakni balai desa Ngabetan dan pencahayaan yang memadai.
4. Saksi calon ialah BPD, panitia, pemantau dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
5. Penentuan surat-surat yang sah dan surat suara yang tidak sah dilaksanakan secara konsisten dan terbuka.

Berdasarkan data wawancara yang peneliti dapat berita acara pemilihan kepala desa Ngabetan tahun 2019 diperoleh data sebagai berikut:

a.) Calon Kepala Desa

Sanadi merupakan petahan di Desa Ngabetan yang menjabat di tahun 2013 hingga 2019. Di tahun 2019, Sanadi mencalonkan diri kembali dengan keyakinan besar akan memenangkan pemilihan dengan bermodal riwayatnya sebagai Kepala Desa serta modal uang yang dia gunakan untuk politik uang. Sanadi merupakan calon dengan modal kekayaan paling besar yang mengeluarkan uang sebesar 1 milyar sebagai biaya kampanye politik.

Tabel 11. Profil Calon Kepala Desa Nomor Urut 1

Nomor Urut 1	
Nama	Drs. Sanadi S,Pd
Pendidikan	S1
Pekerjaan	Swasta
Alamat	Ds. Ngabetan Rt. 01 Rw. 03
Tempat, Tanggal, Lahir	Surabaya, 15 Mei 1964

Sama halnya dengan Sanadi, Ali merupakan petahana yang memimpin desa di tahun 2007 hingga 2013. Namun, keberadaannya pada pemilihan desa di Tahun

2019 tidak terlalu menantang. Hal tersebut dikarenakan tidak ikutnya Ali dalam permainan politik uang di desa sebab minimnya dana yang ia miliki. Sehingga strategi politik yang ia lakukan bersifat kampanye biasa yang dilakukan secara mulut ke mulut tanpa memberikan imbalan uang sebagai tanda jaminan untuk memilihnya di proses pemilihan nanti. Ali juga tidak sanggup dalam membentuk tim sukses sehingga Ali mengandalkan relasi keluarga yang ia miliki di Desa Ngabetan.

Tabel 12. Profil Calon Kepala Desa Nomor Urut 2

Nomor Urut 2	
Nama	Ali Masyudi
Pendidikan	SMA YPI Darussalam
Pekerjaan	Swasta
Alamat	Ds. Ngabetan Rt. 01 Rw 01
Tempat, Tanggal, Lahir	Gresik, 03 Juni 1966

Muchammad Taufiq adalah penantang baru dalam kursi pertarungan pemilihan Kepala Desa Ngabetan. Kehadirannya cukup menantang dengan kuatnya relasi yang ia bangun bersama anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna, Taufiq juga memiliki kemampuan ekonomi untuk bermain dalam politik uang. Meskipun secara tingkat pendidikan Taufiq kalah dengan Sanadi yang mengenyam pendidikan hingga S1, namun Taufiq lebih memiliki latar belakang yang bagus dengan warga dibandingkan Sanadi. Reputasi tersebut juga menjadi modal politiknya dalam mencalonkan diri di kursi pemilihan desa di Tahun 2019.

Tabel 13. Profil Calon Kepala Desa Nomor Urut 3

Nomor Urut 3	
Nama	Muchamad Taufiq
Pendidikan	SMK YPI Darussalam
Pekerjaan	Swasta
Alamat	Ds. Ngabetan Rt. 02 Rw. 03
Tempat, Tanggal, Lahir	Gresik, 05 Mei 1988

b.) Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tabel 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Nama	Jabatan
Imam Rafa'i	Ketua
M. Chilaton Nafiq	Wakil Ketua
Isnawatin Sholikah	Sekretaris
Cholishotun Na'imah	Bendahara
Muntaji	Anggota
Taufiq	Anggota
R. Soebagyo SH	Anggota

c.) Saksi Calon Kepala Desa

Saksi I	Saksi II	Saksi III
Syarozi	Abd Ghofur	Syafi'I Arief

d.) Hasil penghitungan surat suara pemilihan kepala desa Ngabetan

1. Jumlah DPT : 2546
2. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT :2298
3. Jumlah surat suara yang tidak dipakai :312
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah memilih kandidat :-
5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :-
6. Jumlah surat suara sah :2271
7. Jumlah surat suara tidak sah :26

e.) Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkades Desa Ngabetan Tahun 2019

Hasil dari pilkades desa Ngabetan tahun 2019 dimenangkan oleh kandidat nomor urut 3, yaitu Muchamad Taufiq dengan total jumlah suara 1.071 suara,.

Kandidat Sanadi mendapatkan suara terbanyak kedua dengan total jumlah suara 1.014 suara, sedangkan jumlah juara urutan ke tiga diperoleh oleh kandidat Ali Mashudi yaitu total jumlah suara sebanyak 187 suara. Berikut adalah rekapitulasi suara dari setiap pasangan calon:

Tabel 15. Hasil Rekapitulasi Pilkades Desa Ngabetan Tahun 2019

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1	Drs. Sanadi S,Pd	1014
2	Ali Mashudi	187
3	Muchamad Taufiq	1071

Menurut data yang didapatkan peneliti, hasil perolehan Taufiq sangat besar di dusun tempatnya tinggal, Dusun Ngabetan, sebesar 571 suara. Perolehan suara tersebut cukup jauh dibandingkan dua kandidat lainnya yang hanya menyentuh 400 suara untuk Sanadi dan 172 untuk Ali. Sedangkan Sanadi menang di dusun tempatnya tinggal, Dusun Kejambon, dengan selisih angka yang cukup besar dengan Taufiq dan Ali. Hasil yang cukup imbang ditemukan di Dusun Sukorejo dengan selisih angka 3 suara. Sedangkan Ali sendiri memiliki perolehan suara yang sangat kecil di 3 dusun tersebut. Sehingga Taufiq dan Sanadi unggul di dusunnya masing-masing. Namun, tidak dengan Ali yang kalah telak di setiap dusun.

Tabel 16. Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Calon Tiap Dusun

Dusun Kejambon (Kejambon, Patra dan Queen)		
No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1	Drs. Sanadi S,Pd	339
2	Ali Mashudi	39
3	Muchamad Taufiq	221
Dusun Ngabetan		
No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1	Drs. Sanadi S,Pd	400
2	Ali Mashudi	127

3	Muchamad Taufiq	572
Dusun Sukorejo (Sukorejo dan Apsari)		
No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1	Drs. Sanadi S,Pd	275
2	Ali Mashudi	21
3	Muchamad Taufiq	278

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tatanan Sosial Politik Masyarakat Desa Ngabetan dalam Konteks Pilkades Ngabetan Tahun 2019

Sebelum mengkaji lebih dalam bagaimana proses politik penyelenggaraan Pilkada Ngabetan 2019, penting untuk mengetahui bagaimana tatanan politik masyarakat Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ini berdasarkan faktor sosial, ekonomi, dan politik—terutama meliputi mata pencaharian, tempat tinggal, keagamaan, hingga hubungan antar-warga. Menilik tatanan begitu krusial mengingat penelitian ini bermaksud membongkar jejaring klientelistik beserta mengidentifikasi sekaligus menjelaskan unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya. Desa Ngabetan sesuai letak geografisnya memiliki masyarakat yang terbagi dua jika diklasifikasikan menurut teoritorialnya, yakni warga perumahan dan perkampungan. Meski demikian, klasifikasi tersebut tidak menjadi pengaruh terbelahnya masyarakat Ngabetan, yang disebabkan oleh salah satu faktor kesamaan identitas agama. Menurut data yang ditemukan, Ngabetan memiliki warga yang mayoritas beragama islam bercorak NU atau Nadhlatul Ulama, suatu organisasi yang sangat besar dan memiliki banyak massa di Indonesia.

“enggak mbk tapi kemarin ada masukan dari masyarakat perumahan yang minta diikuti sertakan dalam acara-acara seperti ini karena dulu kurang di perhatikan sama kades yang lama jd kita juga ngajak untuk orang-orang perumahan ikut acara. Dan tahun depan kita tata kembali biar adil dan merata.....masih masih ada sedekah bumi setiap satu tahun sekali, tetapi ya suasana religi disini sangat kental juga kadang istighosahan juga di wilayah ngabetan sendiri.”³⁹

Warga perumahan merupakan warga yang tergolong baru di daerah Ngabetan dan tidak begitu mengerti apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di desa, misalnya seperti sedekah bumi dan *istighosah*. Hal tersebut disampaikan oleh

³⁹ Wawancara dengan Taufik, Kepala Desa sekaligus Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

kepala desa yang juga tak lama menerima masukan dari warga yang bertempat tinggal di perumahan. Salah satu masukan tersebut adalah permohonan agar warga perumahan diikutsertakan atau diundang jikalau warga setempat—yang tergolong sudah lama tinggal di Ngabetan—mengadakan sejumlah kegiatan.

“ada ya kaya sedekah bumi tapi sedekah buminya gak rame-rame, cuma tahlilan aja sama ke makam yang dituakan makamnya mbah ronggo terus malemnya itu biasanya ada melek an, tim suksesnya pada melek an dirumah e para kandidat sebelum pencoblosan.”⁴⁰

Masyarakat Desa Ngabetan masih tergolong masyarakat yang tradisional—dari segi sosial, agama, maupun kebudayaan. Mayoritas masih menjalankan ritual keagamaan dan sesekali masih menjaga tradisi Jawa seperti berkunjung ke makam tetua yang dipercaya dulunya ada hubungan dengan salah satu Wali (dalam kepercayaan islam) atau penyebar agama di pulau Jawa. Tetua tersebut menurut keterangan bernama Mbah Ronggo, yang dipercaya mendirikan Desa Ngabetan pertama kalinya. Dalam konteks sebelum Pilkades, masyarakat juga kerap melakukan hal-hal yang dipercaya mendatangkan hal-hal baik dalam proses Pilkades, terutama warga yang mencalonkan diri.

Sementara di segi ekonomi khususnya mata pencaharian, masyarakat Desa Ngabetan memiliki pekerjaan mayoritas sebagai pekerja sektor industri, yang mana sebanyak sekitar 1200-an lebih dari 4000-an total jumlah masyarakat usia produktif yang tercatat memiliki pekerjaan. Hal tersebut juga berkaitan dengan wilayah gresik sebagai kawasan industri, termasuk wilayah sekitar desa Ngabetan. Dalam mengidentifikasi struktur masyarakat, tentunya terdapat sudut pandang elit bahwa dari lapisan masyarakat tertentu, terdapat segelintir yang memiliki keunggulan dari sejumlah sektor—dari ekonomi, sosial, ataupun politik.⁴¹ Elit selanjutnya dibagi menjadi 2, yakni elit yang memerintah dan elit yang tidak

⁴⁰ Wawancara dengan Enis, Warga Ngabetan

⁴¹ Keller, Suzanne. 1984. Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit – Penentu dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Rajawali hal. 63-66

memerintah tau dalam konotasinya yakni elit politik dan elit non-politik. Elit Politik dalam masyarakat Ngabetan adalah sejumlah perangkat desa yang menduduki institusi pemerintahan desa seperti LPMD, BPD, dan Pemdes. Sedangkan, elit yang tidak memerintah atau elit non-politik, yang berarti memiliki keunggulan dari sektor lain selain politik adalah tokoh masyarakat, salah satunya di desa Ngabetan adalah pak Subari yang dihormati oleh warga desa Ngabetan, selain karena umur dan pengalamannya tinggal di Ngabetan, pak Subari juga memiliki kedekatan dengan perangkat desa dan cukup mendapatkan tempat di hati para pemuda. Kelompok pemuda juga cukup mengisi pengaruh dalam struktur sosial-politik desa Ngabetan, yakni melalui wadah karang taruna. Secara tidak langsung, karang taruna dinilai sebagai salah satu perwakilan yang dapat memberikan pengaruh bagi berjalannya pemerintahan desa maupun kehidupan di desa secara universal.

Status sosial yang paling menonjol dari temuan penelitian cenderung mengarah pada basis sosial dan politik saja, bukan secara ekonomi. Jikalau ada elit ekonomi-pun, mereka tidak terlalu *mentereng* dan tidak memiliki pengaruh serta kaitan dengan kontestasi Pilkada. Pada Pilkades Ngabetan tahun 2109, terdapat 3 orang dari warga kepala desa yang mencalonkan diri. Namun, sesuai data yang ditemukan, mayoritas dari mereka tidak mengandalkan warga lain yang memiliki keunggulan ekonomi untuk membiayai mereka mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa, melainkan seluruh modal ditanggung oleh mereka.

*"Ya nggak tau mbk, cuma ya rumornya ada yang bantu dari pihak PU ganti ruginya ya untuk ngecor desa, tapi juga dari dana pribadi kan itu urusan pribadi masing-masing mbk jd saya gak tau. Tapi dia dulu juga punya tambak di banjarsari kayanya dijual buat pilkades ini mbak. Kan aslinya banjarsari pak taufiq. Kalo pak sanadi sama mashudi pernah jadi kades uangnya cukup, juga keduanya berdagang punya usaha sendiri. Kalau di sini juga banyak tambah, sawah dibeli orang cina buat perumahan. Dari luar mereka itu."*⁴²

Kepemilikan lahan yang biasanya menjadi kunci keunggulan orang-orang desa, yakni lebih tepatnya adalah tanah atau sawah, tidak menjadi hal yang cukup

⁴² Wawancara dengan Pak Subari, Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan

bisa dijadikan temuan data yang berpengaruh terhadap status sosial dalam penelitian ini. Sehingga faktor tersebut mengarah kepada kepemilikan modal secara pribadi para calon kepala desa yang lebih pantas disebut sebagai elit politik. Dari beberapa alasan, misalnya Sanadi dan Ali Mashudi, yang mana keduanya pernah menjabat sebagai perangkat desa dan pastinya memiliki kekuatan secara politik sebagai orang yang pernah memenangi kontestasi tingkat desa tersebut. Sedangkan Tokoh masyarakat merupakan elit non-politik yang memiliki hampir setara dengan perangkat desa mengingat masyarakat Ngabetan tergolong masyarakat tradisional yang sangat menghormati tokoh masyarakat.

“Semuanya datang kesaya untuk minta izin minta izin soalnya dapat dikatakan kalau saya ini tertua lah dimasyarakat sini jadi ketiga kandidat itu datang kesaya karena menurut mereka saya jadi orang tertua mbk hehe, kan sudah umur 70 tahun saya mbk, dulu saya jadi lkmd lama sekali sampai gak ada yang mengganti haha”⁴³

Terdapat satu informan dalam penelitian ini yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai tokoh masyarakat atau orang yang paling memiliki pengaruh di Ngabetan bernama Pak Subari. Ia berprofesi sebagai wirausaha, yang mana selain dihormati oleh warga, ketiga calon kepala desa yakni Ali Mashudi, Sanadi, dan Taufik sebelum mengikutsertakan diri dalam kontestasi tahun 2019 mulanya memohon ‘restu’ terlebih dahulu kepada Pak Subari. Menurut pengakuannya, selain umurnya yang paling tua di desa, pengalamannya sebagai pengurus LKMD yang menjadikan ia dikenal masyarakat serta sekaligus menjadi tokoh agama di Ngabetan. Pak Subari juga menyatakan bahwa selain kekuatan tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa, di era sekarang, Desa Ngabetan memiliki kekuatan yang relatif cukup dimiliki oleh anak-anak muda. Pemuda yang dimaksud bermanifestasi di dalam suatu organisasi Desa, yakni karang taruna.

“Sekarang yang lumayan itu pemuda-pemuda, diperhitungkan. Bahkan sering kalo ada keputusan desa itu mereka berperan. Kebijakan apa gitu kadang ya. Kemenangan tauifik itu, Strateginya ya dia menggait karang taruna, karang

⁴³ Wawancara dengan Pak Subari, Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan

taruna itu dirangkul, dan makanya anak-anak muda suka gitu jadi anak-anak perumahan juga diajak dan dirangkul makanya dapat suara diperumahan. Kampung juga, sama banyaknya”⁴⁴

Pemuda yang terlibat di karang taruna rupanya memiliki suatu pengaruh yang cukup diperhitungkan, khususnya dalam struktur sosial politik masyarakat Ngabetan. Terlepas dari konteks kemenangan Taufik sebagai Kepala Desa Ngabetan yang memenangkan kontestasi pada tahun 2019, sejumlah informan menyatakan bahwa karang taruna merupakan lembaga yang dikenal oleh masyarakat Desa, dan hampir setiap kegiatan desa keterlibatannya menjadi unsur yang penting. Tak hanya itu, keputusan serta kebijakan yang diambil oleh perangkat desa juga mulai menjadikan komponen pemuda sebagai salah satu faktor penting.

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Subari, Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan

3.2 Pemetaan Sumber Kekuasaan dan *Bargaining* Politik Calon-Calon Kepala Desa pada Pilkades Ngabetan Tahun 2019

Pilkades Ngabetan 2019 diikuti oleh sejumlah kontestan selain Taufik, yakni Sanadi dan Ali Mashudi. Keduanya dikalahkan oleh Taufik dikarenakan beberapa faktor. Namun, di samping itu, sebenarnya kedua calon memiliki sumber kekuasaan sebagai calon Kepala Desa yang cukup mumpuni, misalnya secara sosial dan ekonomi, sebab keduanya merupakan mantan Kades dan petahana Kades Ngabetan. Sanadi adalah Petahana yang mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala desa 30 Juli 2019, dan Ali Mashudi adalah mantan kepala desa periode sebelum Sanadi. Kedua calon tersebut sedianya telah memiliki jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk meraup suara pemilih, terutama Sanadi yang menjadi petahana. Akan tetapi, pada kenyataannya, Sanadi dan Ali Mashudi harus kalah oleh pemilihan kepala desa melawan Taufiq sebagai pendatang baru. Sub-bab ini hendak membahas bagaimana para kontestan menggunakan *bargain* politiknya untuk memenangi Pilkades Ngabetan 2019, serta apa saja yang mempengaruhi hasil Pilkades Ngabetan 2019.

Sanadi menjabat sebagai kepala desa periode 2013-2019, sebelum menjadi kepala desa, Sanadi menjadi seorang guru di SMP dan SMK Darussalam. Sanadi mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa terdorong alasan karena ingin melanjutkan program-program kerja yang belum terselesaikan. Menurutnya, pembangunan yang sudah dilakukan pada periode pertama terfokus pada pembangunan infrastruktur di desanya. Di periode yang kedua nantinya ia akan memfokuskan pada pembangunan manusia. Seperti yang disampaikan dalam wawancara kepada peneliti:

“ya yang paling penting itu sosial karena saya belum selesai keranah sosialnya mbk kemasyarakat sini, itungane koyok pembangunan secara fisik di desa sudah banyak yang saya cover, tinggal sosialnya yang belum, kaya bantu membantu masyarakat kurang banyak, kalau sekarang kan masih skala yang saya prioritaskan banyak di fisik ya jalan, ya ruko, ya banyak tapi masih belum puas, di ponpesdes saya itu juga saya bangun dulunya gubuk sekarang sudah saya bangun dengan lebih

baik, ya sosialnya saya ada cuma kan kebanyakan saya ke infrastruktur gitu.”⁴⁵

Dari penuturan Sanadi yang memfokuskan pada pembangunan infrastruktur mendapatkan respon yang kurang baik dari warga, salah satu warga yang mengeluhkan hal ini adalah Enis. Menurut Enis, dan pembangunan yang dilakukan seharusnya dapat dialokasikan berupa bantuan sosial bagi rakyat miskin. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Enis, dia menyebutkan alasan dibalik kekalahan Sanadi. Berikut kutipan penuturanya:

“ya karena orang ngabetan itu udah gak ada yang suka sama pak Sanadi, soalnya kan orang e itu kebanyakan proyek-proyek mbangun-mbangun tok gitu loh mbak, tapi kesejahteraanya orang desa itu gak diperhatikan. kebanyakan mbangun-mbangun gitu mbak, kan mendingan uangnya buat orang yang gak punya. Tapi kalau pak sanadi uang e lebih buat bangun-bangun aja gitu jadinya banyak yang gak suka.”⁴⁶

Proyek-proyek pembangunan yang dilakukan sanadi lebih condong kepada pembangunan infrastruktur jalan, ponpesdes, dan juga ruko yang terletak di muka desa, serta fasilitas pendukung olahraga. Detail yang tidak dilakukan oleh Sanadi adalah dalam pembangunan proyek pembangunan desa, dia tidak melibatkan warga desa sebagai pekerja proyek. Kealpaan sanadi melihat warganya yang membutuhkan pekerjaan menjadi *blunder* dan menjadi borok dalam kepemimpinannya. Sanadi dalam pembangunan proyek pembangunan desa tidak mempekerjakan warganya, malah berlaku sebaliknya dengan menyerahkan proyek pembangunan kepada orang luar. Sanadi tidak mampu membangun strategi klientelistik melalui proyek-proyek pembangunan untuk semakin mendekatkan diri kepada warganya. Di titik ini, Sanadi kalah dengan Taufiq yang membelanjakan dana pribadinya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan masyarakat.

Selain itu, Sanadi telah melukai kelompok pemuda dalam proyek pembangunan fasilitas olahraga, ketika menuduh beberapa pemuda telah merusak

⁴⁵ Wawancara dengan Sanadi, Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkadaes 2019

⁴⁶ Wawancara dengan Enis, Warga Ngabetan

fasilitas ketika mereka memakainya. Menurut ketua karang taruna ketika ditanya tentang kasus ini, Yoga menjelaskan bahwa lapangan yang baru 1 bulan dibangun oleh Sanadi mengalami keretakan, sehingga ketika ada wartawan meliput, Sanadi malah menuduh Pemuda Karang Taruna yang telah merusak. Padahal anak-anak karang taruna sama sekali tidak mengetahui perihal kerusakan lapangan. Tidak hanya itu, Sanadi memperparah hubungannya dengan pemuda karang taruna dengan menyebutkan tuduhnya dalam pidato 17-an. Seharusnya hal itu adalah sebuah kecerobohan yang tidak perlu dilakukan oleh seorang kepala desa. Oleh sebab itu, banyak pemuda memilih mendekat dan menjelang pemilihan menjadi tim sukses taufiq, oleh karena pendekatan Taufiq yang mengayomi kegiatan kepemudaan dan menemani pemuda secara intens melalui hubungannya di warung kopi. Berikut penuturan Yoga tentang Sanadi selama menjadi Kepala Desa :

“untuk kemarin sih kebanyakan ke pak taufiq mbk soalnya kita juga udah kecewa sama pak sanadi mbk, banyak banget kecewanya mbk kita. Contohnya kalau kita mau bikin acara harus cari uang sendiri mbk, dapet pemerintah katanya kita cuma dapet 1.500.000 mbk selama beliau menjabat anak kartar cuma dapet segitu untuk ngadain acara-acara.”⁴⁷

Terakhir, menurut analisis peneliti, faktor kunci kekalahan Sanadi adalah terletak pada strategi yang dipakai. Dia sendiri mengakui banyak lubang dalam strategi yang dijalankan, dari pembentukan tim sukses, praktik jual-beli suara, dan kelompok target pemilih. Kehilangan broker kunci sama dengan kehilangan penghubung utama kepada pemilih. Sanadi dalam pemilihan kepala desa kali ini juga memakai politik patronase berbasis *vote buying* untuk menarik suara pendukungnya. Strategi patronase yang dilakukan oleh Sanadi menggunakan jejaring formal seperti ketua RT, ketua RW dan perangkat desa di bawah kepemimpinannya selama menjadi kepala desa. Tim sukses yang dibentuk oleh Sanadi berjumlah kurang lebih 110 orang yang tersebar di berbagai wilayah desa Ngabetan. Mayoritas tim sukses diisi oleh orang-orang tua dalam jejaring sosial Sanadi, baik dari perangkat desa maupun keluarga dan tetangga. Sanadi

⁴⁷ Wawancara dengan Yoga, Ketua Karang Taruna Desa Ngabetan

menargetkan suara di atas seribu dengan menyiapkan uang pesangon untuk memilih sejumlah 300 ribu rupiah, dan beberapa orang mendapatkan 500 ribu.

Sumber kekuasaan Sanadi terletak pada besaran nominal uang yang ia berikan kepada calon memilih saat menjelang Pilkada berlangsung, serta beberapa aset ruko yang ia manfaatkan sebagai salah satu strategi untuk menarik memilih. Sanadi dapat dianggap calon yang paling ‘kaya’ di antara calon-calon Kades yang lain, mengingat modal politiknya yang terlihat saat transaksi jual-beli suara dilakukan menjelang pemilihan. Tak hanya itu, legitimasi Sanadi sebagai petahana juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan, mengingat selisih suara pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Ngabetan yang tak sampai 100 suara dari pemenang kontestasi tersebut. Selain memiliki material dan jabatan yang *mentereng*, Sanadi juga memiliki pendukung yang loyal terhadapnya, yakni kebanyakan dari ‘golongan tua’.

Dalam strategi patronase semacam ini diperlukan broker yang benar-benar dapat dipercaya sekaligus memiliki pengaruh kuat terhadap warga. Peran broker sangat penting sebagai distributor uang dan barang patronase kepada memilih. Keberhasilan strategi ini terletak pada integritas broker, apakah benar-benar menyampaikan uang pesangon yang diberikan kepada memilih sesuai dengan jumlah awal, atau malah mengutil sebagian, atau bahkan membawa seluruh uang pesangon yang seharusnya diberikan kepada memilih. Terbukti, menjelang pemilihan kepala desa, salah seorang anggota tim yang seharusnya membawa beberapa suara tidak kelihatan datang dalam pertemuan jamuan makan. Besoknya, hasil pemilihan menunjukkan kekalahan Sanadi dari Taufiq yang menurut indikasinya, salah seorang timnya dibeli atau beralih ke kubu Taufiq. Mengingat jarak suara antara Taufiq dan Sanadi tidak sampai 100 suara, dapat dilihat bahwa kehilangan satu broker yang membawa beberapa memilih dapat berdampak besar pada hasil pemilihan. Analisis tentang broker, lebih detail dalam pembahasan sub-bab politik klientelisme dan patronase.

Kekalahan Sanadi menunjukkan bahwa meskipun sebagai petahana telah gagal memanfaatkan posisi strategisnya. Sanadi yang mampu menggunakan

sumber dana desa dan pemerintah untuk strategi patronase melalui *pork barrel* maupun *vote buying* yang lebih besar daripada lawannya telah gagal menarik suara pemilih. Temuan ini semakin memperkuat bahwasanya, politik patronase berbentuk *prok barrel* dan *vote buying* tidak cukup efektif dalam mengunci suara pemilih. Meskipun untuk kasus yang berbeda yang dilakukan oleh Ali Mashudi yang tidak menggunakan *vote buying* sama sekali hanya mendapatkan sekitar 200 suara. Terakhir, temuan lain yang muncul soal *vote buying* adalah uang pesangon yang diberikan oleh tim sukses Sanadi kepada pemilih tidak efektif, terbukti dengan banyak yang menerima pesangon dari Sanadi, tetapi pilihannya ke Taufiq. Seperti yang disampaikan oleh Sanadi:

“Ya banyak juga yang datang tapi banyak sangu-sangu yang dibagikan oleh tim sukses ini (yang tidak datang) tidak mencoblos saya karena sudah dibeli oleh orang-orang dari pak taufiq itu, jadi kecurangan ada disitu jadi kita tidak mempermasalahkan itu kan yaa orang mencari masa juga dengan caranya masing-masing gitu.”⁴⁸

Penuturan terus terang juga disampaikan oleh Enis terkait uang pesangon, dia mengaku menerima uang pesangon dari tim sukses sanadi sekaligus dari tim sukses Taufiq menjelang hari-H pemilihan pada malam hari. Dengan menerima uang dari keduanya, Enis tidak serta merta merasa bersalah atas sikapnya, dan mengakui bahwa sebenarnya kedua tim sukses tahu bahwa Enis dan mungkin warga lain yang mendapat uang pesangon double. *Banyak an pak Sanadi mbk, lawong aku aja dapet dua dari pak Sanadi sama paktaufiq haha, kalau pak Taufiq 150rb kalau pak Sanadi 200. Kalau pak Ali gak ngasih.*(Wawancara Enis). Kesalahan tim sukses dalam mememtakan segmentasi pemilih membuat strategi patronase *vote buying* tidak efektif, sehingga memboroskan dana dan tidak mendapatkan imbalan suara yang diharapkan.

Dalam pemilihan kepala desa ngabetan kemarin, Enis memilih taufiq, meskipun uang pesangon yang diberikan Sanadi lebih besar. Seperti penuturanya di atas, bahwa Enis sudah tidak suka dengan Sanadi, terutama ketika keluarga yang

⁴⁸ Wawancara dengan Sanadi, Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

memiliki tambak mengalami kerugian dengan jebolnya tanggul karena banjir. Keluarganya yang mengadu kepada Sanadi ketika dia menjabat sebagai kepala desa, hanya mendapat 500 ribu sebagai uang ganti rugi. Keluarganya tersinggung dengan kecilnya uang ganti rugi yang diberikan oleh Sanadi. Seperti yang disampaikan oleh Enis dalam wawancara :

“soalnya keluarga sini milihnya pak taufiq semua kan sudah sakit hati sama paksanadi, dulu itu pernah kan bapak punya tambak seh terus galengane iku jebol gara-gara banjir kan mbak saking banyaknya air, sama paklurah sanadi itu Cuma dikasih uang 500rb tok gak pakai survey dulu kok gak gini gitu dulu gak diliat dulu kondisinya yaopo iki kondisine rakyatku enggak mbk dan cuma dikasih uang 500rb, lah wong uang 500 loh mbak gak cukup buat mondasi istilahe ya kok gak dijenguk gitu.”⁴⁹

Kandidat Pilkades tahun 2019 lainnya adalah Ali Mashudi, yang merupakan seorang mantan kepala desa ngabetan periode sebelum Sanadi. Seperti yang disebut di atas, Kodir merupakan broker yang berpengaruh dalam kemenangan Ali Mashudi. Akan tetapi, hubungan keduanya retak ketika Ali Mashudi mengingkari janjinya, yaitu menjadikan Kodir sebagai perangkat desa. Relasi Klientelistik seringkali rusak oleh karena janji yang diberikan berupa jabatan atau materi seringkali dilupakan oleh kandidat. Hal ini yang membuat Kodir berpindah haluan kepada Taufiq yang relatif masih bisa disetir olehnya. Ali Mashudi kehilangan broker penting yang menghubungkannya dengan pemilih.

Faktor kunci kekalahan Ali Mashudi terletak pada ketidakmauannya untuk menggunakan strategi politik patronase berbasis *vote buying*. Ketidakmauan Ali sebenarnya didasari oleh ketidaksiapannya untuk mengeluarkan dana pribadi untuk melakukan praktik patronase. Ali malah menyalahkan masyarakat desa ngabetan yang sudah rusak dengan praktik jual beli suara, tanpa melihat kepemimpinan kandidat. Dalam wawancaranya ia menuturkan bahwa :

⁴⁹ Wawancara dengan Enis, Warga Ngabetan

“semua orang kalau berpolitik itu rusak, calon 3 kalau pakai uang tiga-tiganya ya dapet suara semua. Satu rumah 5 orang calon 3 pakai uang semuanya dapet tiga-tiganya, kalau pak taufiq ngasih 150, paksanadi 200 ya diambil semua orang sinikan kaya gitu udah rusak sin.”⁵⁰

Ali Mashudi terlihat aji mumpung dalam pencalonannya kali ini, terlihat bahwa tidak ada keseriusan dalam menjalankan strategi kampanye maupun usaha maksimal untuk menang. Ketika ditanya strategi yang digunakan, jawabanya hanya doa saja. Keuangan pribadinya yang tidak cukup untuk melakukan *vote buying* membuatnya beralasan bahwasanya warga desa sudah rusak oleh praktik patronase semacam ini. Meskipun begitu, dalam pencalonannya ketika dia memenangkan pemilihan kepala desa tahun 2007, dia mengaku bahwa dia juga menggunakan strategi *vote buying*.

Sumber kekuasaan yang dimiliki oleh Ali Mashudi sebenarnya dapat menjadi keunggulan pada Pilkades 2019, nemun sayangnya seluruhnya tidak dapat maksimal dan ia hanya mendapatkan tak sampai 200 suara dari masyarakat Desa Ngabetan. Sumber kekuasaan tersebut meliputi keluarga dan kerabat. Selain itu, ia merupakan satu-satunya kandidat asli Desa Ngabetan, dan kenyataan tersebut telah diketahui orang-orang di sekitarnya.

“betul itu mbak, ya suara saya yang diambil, nah yang sana kan sudah jadi kan jadi gitu, tidak dianggap menang karena dia hanya apa ya untuk mengganti orang kerja itu ndak ada, cuma dunianya ingin menang saja, terus pak ali masyudi juga punya pemikiran bahwa saudaranya itu banyak 60% orang ngabetan itu keluarganya pak ali masyudi, makanya gak atek opo-opo mungkin gitu makanya pak ali gak pakai uang.”⁵¹

“yo enggak seh mbk kan umur e paling juga 50 tahunan, cuma kan kendala saiki kalo gk ada sangu ya gak budal mbk dan pak ali masyudi gak pake uang tapi ya masih dapet suara 300 an dan dia juga dapet suaranya dari keluarga umapanya kalau pak ali pake uang pasti pak ali masih ada harga jual e soalnya pak

⁵⁰ Wawancara dengan Ali Mashudi, Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

⁵¹ Wawancara dengan Sanadi, Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

sanadi udah gk diharapkan tp pak sanadi berani uang ya sainganku pak sanadi.”⁵²

Tak hanya masyarakat saja, kenyataan mengenai kelebihan Ali Mashudi sebagai salah satu calon yang memiliki keunggulan tersendiri yang mana ditunjang dari kekerabatan dan jumlah keluarganya di Desa Ngabetan sekaligus sebagai pemilih juga. Namun, sayangnya meskipun terdapat banyak kerabat yang mungkin saja memilihnya secara sukarela, hal tersebut tak terbukti mengingat hasil Pilkades Ngabetan 2019 yang mana ia hanya meraup sedikit suara. Fenomena itu dinilai dipengaruhi oleh faktor jual-beli suara dari kedua calon lain—yang memungkinkan kerabat dan keluarga Ali Mashudi tak loyal kepadanya lagi dan lebih memilih calon lain karena uang dan manfaat yang ditawarkan oleh Taufik maupun Sanadi.

Kekalahan tersebut juga terjadi akibat ketidakseriusan Ali Mashudi untuk maju di Pilkades Ngabetan 2019—yang menurut keterangannya sendiri tak memiliki motivasi kuat. Ketidakseriusan ini semakin terlihat ketika tidak adanya tim sukses yang sengaja dibentuk untuk memenangkan pencalonannya. Ali hanya mengandalkan saudara-saudaranya saja untuk menggalang suara seadanya. Karena tidak ada uang pesangon yang dibagikan juga, maka tidak banyak pemilih yang bisa diyakinkan, dia hanya mendapatkan suara 270. Dalam konteks ini, strategi politik patronase berupa uang pesangon berfungsi sebagai penetralisir uang pesangon yang diberikan oleh calon lain, sehingga pemilih bisa memilih sesuai dengan pilihannya menurut kategori lain, selain uang. Masalahnya Ali Mashudi sudah kehabisan uang untuk menetralsir strategi patronase yang dilakukan oleh calon lain, sehingga warga juga lebih memilih calon yang mungkin lebih kompeten dan memberikan pesangon daripada yang tidak sama sekali.

“ya karena masyarakat sini takut lek gak nyoblos yaopo wes onok duek e engkok ngene ngene, orang jaman sekarang itu masih kurang keimanannya sama Allah. ya sama suara pak sanadi dibeli pak taufiq suara saya dibeli pak taufiq, begitupun kebalikannya ada yang di beli pak sanadi juga. Karena semua

⁵² Wawancara dengan Taufik, Kepala Desa sekaligus Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

*orang kalau berpolitik itu rusak, calon 3 kalau pakai uang tiga-tiganya ya dapet suara semua. Satu rumah 5 orang calon 3 pakai uang semua ya dapet tiga-tiganya, kalau pak taufiq ngasih 150, pak sanadi 200 ya diambil semua orang sini kan kaya gitu udah rusak sini,”*⁵³

Ali Mashudi menilai bahwa politik di desa dalam konteks Pilkades sudah tak lagi sehat ketika orang yang mencalonkan hanya mengandalkan uang untuk mempengaruhi pemilih. Ali juga terkesan menuduh dan mengklaim bahwa ada calon lain yang membeli suara padahal sebenarnya itu suara miliknya. Selain menjustifikasi bahwa politik uang merupakan perbuatan tercela dan tak bermoral, Ali juga mengemukakan bahwa masyarakat Desa Ngabetan mengalami degradasi iman.

Calon terakhir yang merupakan ‘kuda hitam’ dalam pilkades Ngabetan 2019 adalah seseorang yang tidak pernah menjadi pegawai atau pengurus di tingkat desa—paling tinggi menjadi ketua RT di wilayah perumahan. ‘kuda hitam’ yang dimaksud adalah sesuai dengan KBBI, yakni calon yang semula kurang diunggulkan namun akhirnya bisa memenangkan pertandingan—meski bukan dalam konteks olahraga.⁵⁴ Taufik berusia cukup muda dan bukan merupakan warga asli Ngabetan. Meski begitu, ia memiliki banyak sumber kekuasaan yang mengantarkannya pada kemenangan Pilkades 2019 silam.

*“Kalau menurut saya ya dari kalangan orang tua kan incumbent, kalau pak taufiq dari semua kalangan ada apalagi anak-anak muda kan suka sama pak taufiq, pak taufiq sendiri juga masih muda ganteng juga, jadi semua masyarakat seneng sama sipantiknya pak taufiq juga.”*⁵⁵

Keunggulan yang paling mencolok dimiliki oleh taufik adalah karismanya dan penampilan fisiknya, yang mana hal tersebut tidak perlu didapatkan melalui upaya apapun. Namun, unsur penentu yang menjadi krusial untuk meraup suara yang cukup banyak dalam Pilkades adalah relasi sosial yang dimilikinya dengan

⁵³ Wawancara dengan Ali Mashudi, Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

⁵⁴ <https://lektur.id/arti-kuda-hitam/> diakses pada hari Rabu, 20 Oktober 2021 pukul 12.09

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Subari, Tokoh Masyarakat Desa Ngabetan

masyarakat Desa Ngabetan. Taufik dipandang sebagai orang yang baik secara kepribadian dan ramah terhadap warga sekitar sehingga menarik simpati sebagian besar masyarakat. Secara khusus, Taufik membangun hubungan yang erat dengan pemuda-pemuda di Ngabetan jika dibandingkan dengan Sanadi dan Ali Mashudi. Taufik menurut pengakuan dari pemuda-pemuda yang ada di Desa Ngabetan termasuk orang yang loyal, perhatian, serta guyub dengan masyarakat terutama pemuda.

“...ya kenal lama mbk, dan sering cangkruk di warung mbk, dekatnya balai desa warungnya mbk.... sering mbak soalnya dulu kan dia jadi rt ya jadi dia sering juga nyumbang-nyumbang mbk. ya biasanya bahas-bahas tentang keadaan anak kartar gimana mbk.kalau sebelum jadi kades sering juga minta-minta saran, kaya dulu pernah minta sarang ke saya masalah anak muda ini mintanya apa kebutuhannya apa gitu...ya biasanya bahas-bahas tentang keadaan anak kartar gimana mbk.kalau sebelum jadi kades sering juga minta-minta saran, kaya dulu pernah minta sarang ke saya masalah anak muda ini mintanya apa kebutuhannya apa gitu.”⁵⁶

Ketika para pemuda berkumpul, Taufik tak segan untuk ikut bergabung, dan menanyakan apa saja kebutuhan pemuda terutama mereka yang tergabung dalam Karang Taruna. Karang Taruna di Desa Ngabetan tergolong cukup aktif melakukan kegiatan dan tak jarang membantu perangkat desa dalam merumuskan kebijakan. Menurut pengamatan dari wawancara oleh informan, sikap dan karakter Taufik tersebut memiliki dua makna, yakni secara natural dan untuk kepentingan elektoral—mendekati Pilkades. Bagi kepentingan yang disebutkan terakhir, tak perlu dengan susah payah Taufik menunjukkan kepada masyarakat untuk menarik mereka dengan sikap yang dibuat-buat. Jika dikaitkan dengan konteks elektoral, strategi seperti ini disebut strategi silaturahmi yang merupakan suatu produk akibat interaksi antara institusi formal dan informal. North mengemukakan bahwa institusi formal merupakan bagaimana sistem pemilihan umum yang dilakukan secara representatif dan proporsional, yang memungkinkan masyarakat memilih kandidat

⁵⁶ Wawancara dengan Yoga, Ketua Karang Taruna Desa Ngabetan

tertentu sesuai dengan peraturan yang ada.⁵⁷ Silaturahmi pada dasarnya bukan merupakan unsur alamiah yang muncul dari struktur sosial dan budaya masyarakat tertentu, melainkan dilahirkan akibat interaksi antara sistem kepemiluan dan struktur sosial dan budaya yang ada pada masyarakat. Kondisi ini dimungkinkan akibat dampak melemahnya partai politik, atau lembaga yang menaungi kandidat yang maju di pemilihan umum. Namun, dalam konteks pilkades, di mana partai politik tidak terlibat, maka silaturahmi sendiri lahir dari bagaimana inovasi personal kandidat atas situasi politik yang sedang berkembang.

Selain sisi imaterial dari Taufik yang berwujud relasi sosial, karisma, serta kedalaman hubungan personal terhadap warga Ngabetan, sebenarnya juga Taufik juga memiliki modal yang cukup untuk mengajukan diri di Pilkades. Sebelum jauh membicarakan mengenai jual-beli suara yang mana juga menjadi unsur penting dalam melandasi keterikatan antara patron dan klien ketimbang relasi tanpa kepentingan, maka uang dan manfaat yang diberikan oleh Taufik dalam penelitian ini layak untuk dijadikan komponen yang menarik untuk diteliti sebab menjadi ternyata menjadi pertimbangan warga Ngabetan dalam memilih kandidat kepala desa dalam Pilkades 2019.

“keseluruhan itu 700jt mbk, nah kan setiap rt 3 sampai 4 orang dari orang itu nanti ada 1 pentolan menghadap saya dan ngasih data misalnya dia bawa masa 30 orang dari 4 orang yang ada di rt situ ya saya kasih amplop 30 isinya 150rb gak ada lebih dan kurangnya, jadi keseluruhan data kan 2000 orang jadi ya 150rb di kalikan 2000 orang.”⁵⁸

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari salah satu tim suksesnya saat Pilkades 2019, Taufik mengalokasikan dana kurang lebih sebesar Rp. 700 Juta untuk dibagikan kepada pemilih. Tak hanya itu, Taufik juga dipastikan mengerahkan modal lebih dari yang tercatat sebab pengeluarannya tak sekadar

⁵⁷ Douglass C. North. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic*. London: Cambridge University Press hal. 88

⁵⁸ Wawancara dengan Pak Kodir, Ketua Tim Sukses Pak Taufik

untuk keperluan transaksi jual-beli suara. Maka, sudah tentu dalam hal ini Taufik juga memiliki keunggulan material.

3.3 Klientelisme dalam Kontestasi Pilkades Ngabetan: Penetrasi Uang dan ‘Manfaat’

Kemenangan Taufiq semakin menguatkan berbagai penelitian terdahulu tentang gelaran pemilu di tingkat nasional sampai di tingkat desa, jejaring klientelisme dan strategi patronase masih mendominasi model pemenangan yang dipakai oleh tiap kandidat. Kemenangan taufiq, di luar strategi kampanye, dan kekuatan personal, dia juga tetap menggunakan jejaring klientelistik dan strategi patronase. Sebelum itu, kembali mengingatkan bahwa klientelisme politik dan patronase politik yang digunakan disini mengacu pada pengertian Edward Aspinall dan Ward Berenschot.⁵⁹

Di dalam sub-bab ini akan secara khusus menyoroti detail tentang praktek patronase dan hubungan klientelistik yang berlaku dalam pemenangan Taufiq. Praktik patronase yang digunakan oleh Taufiq berupa *vote buying*, *pork barrel* dan *club goods*. Sebagai penantang baru dalam gelaran pemilihan kepala desa kali ini, Taufiq mengeluarkan dana pribadi untuk mendanai praktik patronase *pork barrel* dan *club goods* jauh sebelum pencalonannya. Sedangkan strategi patronase berbasis *vote buying* dengan sebutan uang pesangon dilakukan mendekati pemilihan kepala desa yang dibagikan kepada pendukungnya sebagai uang ganti hari kerja yang digunakan oleh warga untuk memilih.

Semasa menjadi ketua RT, Taufiq telah menjalin hubungan baik dengan warganya, terutama dengan pemuda-pemuda yang sering cangkruk di warung kopi. Dari kedekatan dengan pemuda yang sering cangkruk ini, Taufiq masuk ke dalam wilayah institusi formal kepemudaan yaitu karang taruna. Taufiq menyumbangkan sebagian uangnya untuk kebutuhan kegiatan yang diselenggarakan oleh karang taruna. Pendanaan yang diberikan oleh Taufiq tidak serta merta diberikan di awal

⁵⁹ Aspinall, Edward Aspinall. W. B. (2019). *Democracy For Sale, Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. Hal. 65

hubungan mereka, melainkan ketika hubungan Taufiq-Karang Taruna sudah berjalan dengan baik. Taufiq bahkan menjadi semacam penasehat informal bagi pemuda-pemuda Karang Taruna secara institusional maupun secara personal. Secara tidak langsung telah berlangsung hubungan klientelistik antara Taufiq dan Pemuda Karang Taruna. Hubungan yang hierarkis dimana Taufiq menjadi pelindung dan penasehat bagi pemuda Karang Taruna. Hubungan ini juga bersifat timbal balik yang terus berulang. Sehingga dapat dikatakan telah memenuhi syarat hubungan klientelistik.⁶⁰

Taufiq secara latarbelakang ekonomi terhitung tidak terlalu kaya, pekerjaannya sehari-hari adalah kuli bangunan, dan berbagai pekerjaan serabutan lain yang bisa dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Taufiq juga merupakan seorang pendatang baru di desa Ngabetan, jarak kepindahannya dengan pencalonannya sebagai kepala desa berjarak enam tahun. Di desa asalnya Banjarsari, Taufiq merupakan keluarga tuan tanah dengan kepemilikan tambak yang cukup luas. Dalam gelaran pemilihan kepala desa Ngabetan, ia mendapatkan uang untuk kampanye, akomodasi, jamuan pertemuan, sampai politik patronase dari penjualan tambak senilai satu milyar sampai dua milyar.

. Jejaring klientelistik lain yang dimiliki oleh Taufiq adalah hubungannya dengan beberapa warga di bawah kepemimpinannya selama menjadi ketua RT. Secara pribadi, Taufiq mengaku sebagai orang yang berjiwa sosial tinggi, ketika ada orang sakit, dia menjenguknya, ada acara tahlilan, dia datang dan memberi sekedar uang. Bahkan ada sebuah cerita menarik tentang hubungan klientelistik antara Taufiq dengan salah seorang warga, Enis menuturkan bahwa ketika anaknya sakit, ia membawanya ke Taufiq untuk diberi *suwuk*. Tidak ada penuturan secara eksplisit dari Taufiq bahwa dia bisa memberi pengobatan semacam paranormal. Melainkan yang pasti, dari sana Enis mempercayai bahwa Taufiq memiliki kekuatan supranatural bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Enis menyampaikan bahwa banyak tetangga-tetangganya mengobati anaknya yang

⁶⁰ Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov. Hal. 1

cerewet, sering nangis (gejala yang biasanya disebut *sawan*) kepada Taufiq untuk *disuwuk*. Klaim dari Enis bahwa Taufiq orang yang punya indera keenam, yang bisa berurusan dengan hal-hal ghoib. Seperti yang Enis sampaikan:

“banyak kok orang yang kesitu buat mintak suwuk (penyembuhan sepiritual), sebelum jadi lurah juga banyak yang kesitu kalau masalah urusan hal-hal ghoib gitu. Terkenal e di masyarakat juga karena emang gara-gara punya itu indra keenam haha”⁶¹

Klientelisme yang dibangun secara tidak sengaja oleh Taufiq memberikan kemudahan baginya untuk menggunakan jejaring sosialnya dalam pemilihan kepala desa Ngabetan. Sehingga ketika nantinya dalam penggunaan strategi politik patronase berupa *vote buying* bisa efektif. Dalam strategi *vote buying*, peran broker sangat penting dalam hal distribusi uang pesangon kepada pemilih. Taufiq cukup beruntung karena Kodir menjadi ketua Tim suksesnya, didorong kedekatannya semasa keduanya menjadi ketua RT, begitu juga dengan Kodir yang sudah sakit hati dikhianati Ali Mashudi, dan di kubu Sanadi, ketua Tim Suksesnya berseberangan secara personal dengan Kodir.

Kodir menjadi broker utama dalam kemenangan Taufiq, dalam perencanaan strategi politik telah terlihat dalam bab sebelumnya. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana Kodir sebagai broker menggunakan strategi patronase *vote buying* untuk menentukan kemenangan Taufiq. Kodir menyebar uang pesangon sebesar 150 ribu sampai 200 ribu untuk pemilih yang dia bagikan melalui broker kecil di tiap gang. Sebelumnya, ia telah menganalisis, apakah warga tersebut berpeluang sebagai pendukung Taufiq atau tidak, jika tidak maka tidak akan diberi uang pesangon. Taufiq sudah mendapatkan daftar pemilih yang akan diberikan pesangon, meskipun secara pasti dia tidak menyebutkan berapa orang yang diberi uang pesangon. Jika dibandingkan dengan besaran uang pesangon yang diberikan oleh Sanadi kepada pemilih, Sanadi lebih besar jumlahnya, yaitu 300 ribu bahkan sampai 500 ribu. Jika dilihat dari besaran uang pesangon, seharusnya Sanadi lebih bisa memenangkan

⁶¹ Wawancara dengan Enis, Warga Ngabetan

pemilihan kepala desa. Lalu kenapa strategi patronase *vote buying* yang dilakukan oleh Taufiq efektif, sedangkan untuk Sanadi tidak.

Jawaban ini dapat dilihat melalui penelitian Ahmad Zainul Hamdi tentang peran broker dalam strategi pembelian suara. Meski tidak ada seorang kandidat pun yang percaya bahwa *vote buying* adalah satu-satunya penentu kesuksesan dalam pemilihan umum, mereka tetap melakukan praktik tersebut. *Vote buying* dalam temuan Hamdi, merupakan sebuah upaya untuk menetralsir kekuatan uang calon lain yang juga menggunakan uang, dengan artian jika semua calon memberikan uang pesangon (dengan jumlah berapapun), maka rakyat akan kembali pada keadaan “normal” dengan menggunakan pilihan rasional dalam menentukan calon kandidat. Di titik ini, jawaban yang sama dapat digunakan untuk kasus Taufiq yang secara personal dan jejaring sosianya baik, tetap melakukan politik uang sebagai upaya penetralisir dari politik uang yang digunakan Sanadi. Meskipun besaran uang yang diberikan oleh Taufiq lebih kecil daripada Sanadi.

Di pihak Sanadi yang telah membagikan uang pesangon sebesar 300 ribu sampai 500 ribu terjadi kebocoran suara. Sanadi tidak menyebutkan secara spesifik wilayah kebocorannya, kemungkinan besar kebocoran suara terjadi di wilayah yang menjadi basis pendukung Taufiq. Meskipun tidak menutup kemungkinan kebocoran suara terjadi hampir di semua RT dan dusun di Desa Ngabetan. Menurut penuturannya, Sanadi menyebut salah satu tetangga dekat rumahnya cerita ke tetangga lain bahwa ia menerima uang dari Taufiq, sedangkan Sanadi juga telah memberinya uang pesangon. Bahkan di dusun Sukorejo, suara Sanadi banyak yang bocor karena data pendukungnya tidak diberikan oleh salah seorang *broker*.

Seperti yang telah disinggung di dalam sub-bab awal, salah satu sebab kebocoran suara Sanadi adalah hilangnya broker yang berpindah haluan ke kubu Taufiq. Mendekati hari pencoblosan, salah satu anggota tim sukses yang sedianya membawa suara kepada Sanadi tidak kelihatan. Sanadi dan tim lain juga menghubungi orang tersebut, ternyata sudah berpindah haluan. Kasus semacam ini seringkali terjadi dalam gelaran pemilihan umum, dari tingkat kepala desa sampai tingkat nasional. Kesuksesan menggunakan jejaring klientelistik dan Strategi

patronase sangat terpengaruh oleh keberadaan para broker. Dalam hubungan yang lebih tinggi di tingkat desa, broker seringkali memanfaatkan calon atau kandidat untuk mengeruk keuntungan finansial. Atau bahkan dalam kasus Sanadi, broker yang sebelumnya mendukungnya, tergoda untuk berpindah haluan mendukung Taufiq. Sebab yang paling sering terjadi adalah karena calon lain dirasa memiliki kesempatan menang lebih besar, atau ditawarkan keuntungan finansial lebih besar.⁶² Meskipun kemungkinan yang pertama lebih masuk akal karena secara finansial Taufiq kalah oleh Sanadi.

Strategi patronase lain yang digunakan oleh Taufiq selain *vote buying* adalah patronase *pork barrel* dan *club goods*. Sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa, Taufiq merupakan ketua RT yang membawahi beberapa kepala keluarga. Selama menjadi RT seringkali Taufiq mengeluarkan dana pribadi untuk kebutuhan masyarakat dan komunitas. Diantaranya adalah sumbangan sekitar 100 juta untuk pembangunan masjid di desa, meskipun ketika ketua Tim sukses Taufiq ditanya perihal sumbangan ini, mengaku bahwa banyak orang tidak tahu kalau Taufiq menyumbang untuk pembangunan masjid. Praktik semacam ini dapat dikatakan sebagai patronase *pork barrel* atau bisa disebut sebagai “barang bersama”. Calon memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk barang bersama yang harapannya masyarakat akan memberikan suaranya kepada calon tersebut.

Sanadi selama menjadi kepala desa juga menggunakan patronase *pork barrel* dalam bentuk pembangunan-pembangunan infrastruktur “penarik suara”. Perbedaan keduanya jelas, bahwa Sanadi menggunakan dana desa untuk membangun “proyek penarik suara” seperti Ponkesdes, Ruko, dan jalan-jalan. Sedangkan Taufiq menggunakan dana pribadinya dalam praktik patronase *pork barrel*. Terbukti kembali bahwa praktik patronase *pork barrel* tidak selalu efektif dalam menarik suara. Menurut Aspinall, meskipun bentuk patronase ini terjadi di mana-mana, praktik ini sama sekali bukan metode yang efektif dalam menjamin

⁶² Aspinall, Edward Aspinall. W. B. (2019). *Democracy For Sale, Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. Hal. 138

suara yang juga sama bermasalahnya dengan *vote buying*. Setidaknya, didasari alasan bahwa banyak penerima manfaat boleh menggunakan “barang bersama” tersebut, tanpa harus membalas dengan suaranya untuk calon.⁶³

Strategi patronase yang diberikan oleh Taufiq kepada pemilih berupa *club goods* berupa fasilitas olahraga. Taufiq mengerti bahwa sebagian besar tim suksesnya adalah pemuda, dan hubungannya dengan pemuda telah berlangsung lama, maka ia tidak segan memberikan janji untuk membangunkan fasilitas olahraga bagi pemuda. Strategi ini cukup efektif, ketika hubungan klientelistik ini sudah terbangun lama. Sehingga pemuda-pemuda bisa bergerak untuk mencari dukungan suara untuk Taufiq. Fasilitas olahraga bagi pemuda karang taruna adalah salah satu bentuk patronase berbasis *club goods* yang diperuntukkan untuk kelompok atau komunitas yang mendukungnya. Dalam studi klientelisme di Indonesia, barang-barang semacam ini juga seringkali digunakan seperti pemberian komputer dan sound system untuk organisasi tertentu, atau pembanguann gedung kantor.

Terakhir, salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah, praktik patronase akan berjalan efektif melalui jejaring klientelistik. Di mana jejaring yang terbangun melalui serangkaian hubungan timbal balik yang menjadi salah satu ciri dari klientelisme. Dengan kondisi yang demikian, relasi ini tidak semata-mata mengandalkan hubungan sementara yang sering disebut “beli-putus” yang seringkali kesulitan dalam mengharapkan timbal balik suara. Hubungan yang berlangsung jangka panjang dengan catatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Taufiq membuktikan bahwa praktik patronase efektif dijalankan ketika jejaring klientelistik sudah terbangun.

3.4 Keseimbangan Modal Sosial dan Material: Faktor Kemenangan Taufik pada Pemilihan Kepala Desa Ngabetan

⁶³ Aspinall, Edward Aspinall. W. B. (2019). *Democracy For Sale, Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. Hal. 184

Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Gresik diselenggarakan pada 31 Juli 2019, begitu juga di desa Ngabetan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi di tingkat desa yang mengharuskan pergantian pemimpin dalam jangka waktu tertentu. Pemilihan kepala desa serentak merupakan amanat undang-undang no. 6 tahun 2014 yang mengharuskan pergantian kepala desa melalui pemilihan umum. Warga desa berhak secara jujur dan adil untuk dipilih dan memilih calon yang nantinya menjadi Kepala Desa. Kepala desa memiliki masa jabatan selama enam tahun, dengan diperbolehkan menduduki jabatan tiga kali secara berturut-turut atau tidak.

Dalam setiap gelaran pemilihan umum, dapat dipastikan untuk mencapai tujuannya diperlukan sebuah strategi politik. Tujuan dari sebuah pemilihan umum tidak hanya kemenangan saja, melainkan lebih dari sekedar kemenangan atau kekalahan melainkan sebuah kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah politik tertentu. Akan tetapi dalam beberapa kesempatan, politisi maupun orang yang terjun dalam politik memaami tujuan di balik strategi politik adalah keuntungan pribadi dengan memperkaya diri sendiri. Padahal Strategi politik secara ideal digunakan oleh seorang politisi untuk mencapai tujuan politik yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Oleh sebab itu, strategi politik menempati posisi penting dalam mencapai tujuan politik. Jika strategi politiknya benar, maka dapat dipastikan separuh jalan sudah terlampaui. Banyak dari politisi gagal mencapai tujuannya karena strategi politiknya tidak pas, baik dari segi perencanaan, hingga jalannya strategi. Oleh sebab itu, dalam gelaran pemilihan kepala desa di Ngabetan ini, seorang berlatarbelakang pekerjaan sebagai kuli bangunan bisa terpilih sebagai Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa Ngabetan diikuti oleh tiga calon kepala desa yang terdiri dari 1 calon incumbent bernama Sanadi, 1 calon mantan kepala desa bernama Ali Mashudi, dan 1 calon penantang bernama Muchamad Taufiq. Dari pemilihan langsung yang diadakan pada 30 Juli 2019, perolehan suara Muchamad

Taufiq mengungguli calon-calon lain dengan perolehan suara 1071 untuk Taufiq, 1014 untuk Sanadi dan 187 untuk Ali Mashudi. Kemenangan Taufiq merupakan fenomena yang menarik jika melihat latarbelakangnya sebagai kuli bangunan bisa menumbangkan lawannya yang merupakan petahana dan mantan kepala desa periode sebelumnya.

Kemenangan Taufiq sebagai kepala desa tentu melalui berbagai proses politik yang dilalui seperti perencanaan strategi, pelaksanaan, evaluasi, sampai mencapai tujuan. Menurut Peter Schroder, strategi politik merupakan strategi yang disusun untuk merealisasikan cita-cita politik. Taufiq memiliki Tim sukses dan para pendukung yang merancang sekaligus menjalankan strategi politik dalam upaya memenangkan Taufiq dalam pemilihan kepala desa. Strategi politik yang digunakan oleh Taufiq selama ini dirancang oleh Ketua Tim Sukses bernama Pak Qodir. Sebagai ketua tim sukses, Qodir berperan besar menjadi pemikir utama sekaligus aktor intelektual dari strategi politik yang dijalankan Taufiq.

Dalam pemilihan kepala desa Ngabetan yang diikuti oleh tiga calon, Taufiq sebagai penantang baru berhasil mengalahkan satu incumbent dan satu mantan kepala desa ngabetan. Strategi politik yang digunakan oleh Taufiq dirancang oleh Ketua Tim Sukses (Qodir) dan dijalankan dengan baik oleh Tim Sukses. Tim sukses dari Taufiq berjumlah sekitar 153 orang dengan beragam latarbelakang pekerjaan dan umur, dari perangkat desa, ketua RT, ketua RW, dan karang taruna. Strategi yang dijalankan oleh Qodir sebagai Ketua Tim Sukses adalah strategi menyerang dan bertahan dalam merebut suara pemilih. Strategi menyerang dari Taufiq meliputi, menggaet anak-anak muda *cangkrukan* dengan memberikan beberapa makanan, minuman, dan rokok, hingga memberikan uang kepada pemilih. Sedangkan strategi bertahan dari Taufiq yaitu mempertahankan suara dari wilayahnya selagi menjadi ketua RT dan kakaknya yang juga menjabat sebagai Ketua RT sebelah dimanfaatkan betul untuk menjaga suara agar tidak kecolongan oleh pesaingnya.

Strategi yang pertama dilakukan oleh taufiq adalah merumuskan tujuan dan visi yang harus dicapai. Tujuan dan visi dari taufiq adalah kemeangan dalam pemilihan kepala desa dan visinya membangun desa ngabetan agar lebih baik. Dari tujuan dan visi tersebut Qodir sebagai ketua tim sukses menerjemahkan ke dalam taktik-taktik untuk sampai pada tujuan strategi. Kedua yang dilakukan adalah memetakan wilayah dan segmentasi pemilih. Qodir melihat bahwa masa lalu Taufiq sebagai ketua RT menjadi salah satu kekuatan utama keunggulan Taufiq. Selama menjadi ketua RT, Taufiq mudah bergaul dengan masyarakat dan mengayomi masyarakat. Terutama di kalangan pemuda, popularitasnya di kalangan pemuda didapatkan melalui cangkrukan di warung kopi. Obrolan-obrolan ringan sebtentang sepakbola, politik, hingga membantu pendanaan kegiatan karang taruna dia alakukan.

Selain mendekati pemuda, selagi menjabat sebagai ketua RT, Taufiq juga mengayomi masyarakat di wilayahnya, dengan mengikuti berbagai kegiatan yg dilakukan oleh warga. Seperti mengikuti tahlilan, *ngelayat*, kerja bakti, dan beberapa kegiatan warga lain taufiq selalu hadir. Ini merupakan modal awal bagi taufiq yang nantinya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Ngabetan. Kebaikan-kebaikan ini menjadi kekuatan yang dimaksimalkan oleh Taufiq untuk mempertahankan dukungan suara dari warga di bawah naungannya selama menjadi RT. Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Schroder yang menyebutkan kelebihan potensial yang dimaksimalkan menjadi kekuatan sebagai strategi politik. (Peter Schroder; 2013; 134)⁶⁴

Selama menjadi Ketua RT, Taufiq juga melakukan pendekatan yang intensif kepada pemuda. Pendekatanya terhadap kelompok pemuda sebenarnya tidak masuk dalam perhitunganya, melainkan secara tidak sengaja dia lakukan dalam tugasnya sebagai Ketua RT untuk mengayomi seluruh warganya. Kedekatan Taufiq kepada pemuda terutama Karang Taruna berawal dari kegemarannya *ngopi* di

⁶⁴ Schroder, Peter. 2013. Buku Strategi Politik. Indonesia: Friedrich-Naumann-Siftung Fuer Die Freiheit. Hal. 139

warung yang juga didominasi oleh pemuda-pemuda. Kedekatannya ini dibangun secara alamiah melalui obrolan dengan tema-tema yang ringan, seperti sepakbola, hiburan, dll. Pribadi Taufiq yang mudah bergaul dan ramah membuat pemuda nyaman untuk mengobrol dengannya. Dari sekedar mengobrol tersebut, hubungan Taufiq dengan pemuda ini berlanjut hingga tingkat saling membantu logistik yang dibutuhkan untuk pemuda. Seperti saat pemuda membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan kepemudaan, ia tidak segan menawarkan bantuan berupa dana.

*“wes ndang diadakno acarane lek onok kurange
dana wes ndang moro o nang aku tak kek I”⁶⁵*

Hubungan antara Taufiq dengan pemuda desa merupakan hubungan yang dibangun atas dasar hubungan non-materi. Meskipun dalam beberapa kesempatan Taufiq perlu mengeluarkan dana untuk membiayai kebutuhan atau untuk mendanai kegiatan yang dilakukan pemuda. Taufiq dengan ringan cangkruk sampai jam 2 malam untuk sekedar mengobrol dengan pemuda di warung. Baik secara sadar maupun tidak, taufiq telah melakukan pendekatan secara halus kepada pemuda desa untuk menjadikannya sebagai *client*-nya. Bahkan menurutnya, walaupun Sanadi sebagai kepala desa, dalam beberapa kesempatan ketika pemuda ingin membuat sebuah kegiatan mereka larinya ke Taufiq untuk sekedar berkonsultasi.

*“kalau ada acara-acara apapun di kampung walaupun
lurahnya pak sanadi tapi anak-anak konsultasinya ke aku mbk,
jadi kalau saya pulang jam 2 malem”⁶⁶*

Praktik klientelistik dalam hubungan taufiq-pemuda desa lebih awet dan berjangka panjang, sehingga ketika pemuda desa dipanggil untuk membantunya dalam pencalonannya, seketika kepatuhan dari para pemuda tidak dipertanyakan. Ini menjadi salah satu kekuatan dari Taufiq yang mampu merawat pendukugnya. Ditambah dengan ketidakhadiran dari Sanadi sebagai Kepala desa ketika

⁶⁵ Wawancara dengan Yoga, Ketua Karang Taruna Desa Ngabetan

⁶⁶ Wawancara dengan Taufik, Kepala Desa sekaligus Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

dibutuhkan oleh pemuda dalam berbagai kesempatan seperti kekurangan dana maupun waktu untuk sekedar berkonsultasi.

Strategi taufiq dalam pemenangan memang tidak secara tersistematis dirumuskan dalam sebuah rencana pemenangan. Akan tetapi dalam praktiknya, strategi-strategi yang dilancarkan dapat dilihat sebagai sebuah strategi politik yang terukur dan terbukti dapat memenangkan Taufiq. Strategi yang dilakukan oleh taufiq secara jujur diungkapkan oleh ketua Tim Suksesnya (Qodir) dalam wawancaranya ;

“karena tim suksesnya jujur, kan yang penting kejujuran toh, nilai itu seandainya banyak itu lebih bagus tapi seandainya banyak tapi tim suksesnya itu gak jujur otomatis kalah.”⁶⁷

Menurut Kodir, bahwa kesuksesan dalam strategi pemenangan Taufiq, ia secara terang-terangan menyebut sejumlah uang dan beberapa bentuk patronase sebagai upaya mendapat suara dari pemilih. Dalam hal ini, praktik jual beli suara di tingkat pemilihan kepala desa di Indonesia sudah lumrah. Terkait besaran uang sebagai upah atau ganti suara bisa bervariasi di tiap-tiap wilayah.

Strategi pemenangan melalui praktik kientelisme seperti yang dilakukan oleh Taufiq tidak sepenuhnya menjadi faktor kunci kemenangannya. Pada kesempatan yang berbeda, dalam sebuah wawancara dengan Pak Sanadi (petahana), bahwa uang yang sudah dia berikan kepada warga melalui *broker* sejumlah lebih besar daripada yang diberikan oleh Taufiq. Ia mengeluhkan bahwa warga desa ngabetan sudah rusak oleh praktik jual beli suara, dan cenderung tidak loyal terhadap seorang politisi jika tanpa imbalan uang atau materi. Seperti yang dia sampaikan ;

“kalau menurut saya pak taufiq itu ada yang sebagian 150 ribu ada sebagian lagi dilebihin, kalau saya ya tak sapu bersih semuanya sama katakanlah 200rb saya sapu bersih.”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Pak Kodir, Ketua Tim Sukses Pak Taufik

⁶⁸ Wawancara dengan Sanadi, Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

Kenyataan ini menunjukkan fakta lain dimana besaran uang yang dikeluarkan tidak selalu berbanding lurus dengan jatuhnya pilihan kepada calon yang memberi paling banyak. Oleh sebab itu, dalam sub-bab berikutnya akan dijelaskan lebih detail tentang praktik klientelisme yang terjadi di pemilihan kepala desa ngabetan.

Sementara ini, cukup untuk melihat kemenangan Taufiq dari strategi politik yang dipakai oleh Tim Suksesnya, dengan melakukan perbandingan dengan strategi politik yang dilakukan oleh calon lain. Strategi politik Taufiq akan coba dibedah melalui konsep strategi politik menurut Peter Schroder⁶⁹ bahwasanya dalam perumusan strategi politik dapat dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya; pertama, perumusan misi dan analisis situasi, perumusan misi yang dilakukan oleh Tim Sukses Taufiq adalah kemenangan pemilihan dengan jujur. Analisis situasi dari kondisi masyarakat ngabetan telah dilakukan oleh Tim Sukses dan Taufiq sebagai gambaran awal untuk merumuskan strategi selanjutnya.

Menurut Tim Sukses Taufiq, masyarakat Ngabetan dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori khusus untuk memudahkan target kampanye dan pesan yang akan disampaikan. Warga desa ngabetan dilihat dari jenis pekerjaannya, sebagian besar adalah buruh pabrik, petambak, petani, wiraswasta, dan sebagian kecil tersebar ke berbagai jenis pekerjaan. Dalam gelaran pemilihan kepala desa dari tahun ke tahun, selalu menghabiskan uang yang besar untuk berbagai keperluan seperti kampanye, maupun untuk jual beli suara. Kodir melihat ini sebagai uang pesangon sebagai kunci pembuka ke dalam upaya menarik suara dari pemilih, bukan kunci utama kemenangan. Maka ia memasukkan kebutuhan akan uang yang cukup besar ke dalam strategi yang akan dipakai. Bahwa warga desa ngabetan cenderung akan memilih calon yang memberikan uang sebagai “pesangon” maupun uang ganti waktu yang disediakan warga untuk mencoblos.

Analisis situasi selanjutnya adalah, melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh calon yaitu taufiq, kemudian juga membandingkan dengan calon-

⁶⁹ Schroder, Peter. 2013. Buku Strategi Politik. Indonesia: Friedrich-Naumann-Siftung Fuer Die Freiheit. Hal. 58

calon lain. Kodir tahu bahwa calonnya yang didukung memiliki kekuatan utama yang didapatkan selama menjadi ketua RT dan pada pribadi Taufiq. Menjadi ketua RT dalam dunia politik Indonesia berarti menjadi patron dari sebuah komunitas masyarakat. Ketua RT adalah modal sosial maupun kultural yang didapatkan melalui legitimasi bahwa dia dipilih sebagai ketua RT oleh warganya. Legitimasi ini tidak disia-siakan oleh Taufiq selama menjabat sebagai ketua RT dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Selama menjabat sebagai ketua RT, Taufiq aktif dalam berbagai kegiatan warga di bawah naungannya. Tidak hanya aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh warganya, ia juga menjadi pelayan warganya dengan kemudahan birokrasi ketika warga membutuhkan surat keterangan yang membutuhkan tanda tangannya. Kemudahan birokrasi yang dilakukan oleh Taufiq menjadi sebuah nilai tambah bagi seorang warga yang benar-benar membutuhkan tanda tangan ketua RT untuk sebuah surat. Taufiq memahami bahwa dalam berbagai urusan birokrasi, sering terjadi kerumitan yang dibuat-buat oleh para perangkat desa seperti RT, RW, maupun Kepala Desa. Sering masyarakat mengeluhkan ketika ingin mengurus surat keterangan dari RT, maupun perangkat desa, perangkat yang bertanggung jawab atas surat tersebut sulit ditemui dengan beragam alasan.

Taufiq juga dikenal sangat dekat dengan pemuda desa, baik yang tergabung dalam karang taruna, maupun kelompok olahraga, seperti “anak futsal” dan “anak volley”. Dalam kesehariannya di luar jam kerjanya sebagai kulibangunan maupun kerja-kerja serabutan yang menjadi matapencahariannya, Taufiq sering cangkruk di warung kopi. Cangkrukan yang dilakukannya selama ini tidak didasari oleh alasan politis, seperti untuk meraup dukungan suara maupun sebagai pendekatan untuk memperoleh legitimasi politik. Menurut penuturannya, *ngopi* adalah kesehariannya, hobi yang nantinya memberikan dampak besar dalam pemenangannya sebagai kepala desa. Aktivitas *Ngopi* yang dilakukan hampir setiap hari oleh Taufiq membawanya pada pertemuan-pertemuan dengan pemuda-pemuda desa yang juga sering *ngopi*. Selama *ngopi*, Taufiq menyisipkan obrolan-obrolan seputar kegiatan kepemudaan, kegiatan yang baik untuk wilayahnya. Taufiq secara tidak langsung

sedang melakukan jaring aspirasi kepada warga, terutama pemuda. Hubungan informal ini nantinya berubah menjadi relasi klientilistik yang dipakai oleh Taufiq dengan memberikan janji-janji politik kepada pemuda. Janji seperti memberikan lapangan volly ketika dia sudah jadi, maupun membangun lapangan futsal sebagai wadah pemuda menyalurkan hobi.

Selain menjadi teman ngobrol ketika ngopi, Taufiq juga sesekali berperan sebagai Ketua RT yang menanyakan kegaitan-kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda. Tak jarang taufiq memberikan nasehat-nasehat kepada pemuda baik secara personal maupun kelembagaan (karang taruna). Seperti menurut penuturan Taufiq;

“kalau ada acara-acara apapun dikampung walaupun lurahnya pak sanadi tapi anak-anak konsultasinya ke aku mbak, jadi kalau saya pulang jam 2 malem dan cangkruk sama anak-anak kampung pasti saya langsung bilang “wes ndang diadakno acarane lek onok kurange dana wes ndang moro o nang aku tak kek i (sudah, segera diselenggarakan acaranya, kalau ada kekurangan dan, segera datang ke saya, nanti saya kasih)” gitu mbak. Soal e kan kades sebelumnya eman (sayang) buat ngeluarin uang untuk masyarakat.”⁷⁰

Taufiq sudah mengantongi beberapa nilai tambah baginya untuk melenggang sebagai calon kepala desa. Dalam analisis kekuatan terdapat dua kekuatan internal dan eksternal.⁷¹ Kekuatan internal yang dilihat oleh Tim Sukses selain Taufiq sebagai ketua RT adalah kepribadian Taufiq sendiri. Secara personal, Taufiq orang yang ramah kepada semua orang, begitu juga dengan jiwa sosialnya yang tinggi, sehingga meskipun terhitung sebagai orang baru atau pendatang, taufiq bisa mudah bergaul dan akrab dengan tetangga desa ngabetan. Taufiq berasal dari desa Banjarsari, pindah ke desa Ngabetan tahun 2014 mengikuti kakaknya yang sudah ada di Ngabetan. Dalam kurun waktu sekitar enam tahun, Taufiq mampu

⁷⁰ Wawancara dengan Taufik, Kepala Desa sekaligus Kandidat Kepala Desa Ngabetan pada Pilkades 2019

⁷¹ Schroder, Peter. 2013. Buku Strategi Politik. Indonesia: Friedrich-Naumann-Siftung Fuer Die Freiheit. Hal.71

menunjukkan sebagai pemimpin yang baik ketika menjabat RT dan menjadi tetangga dan teman yang ramah bagi warga lain.

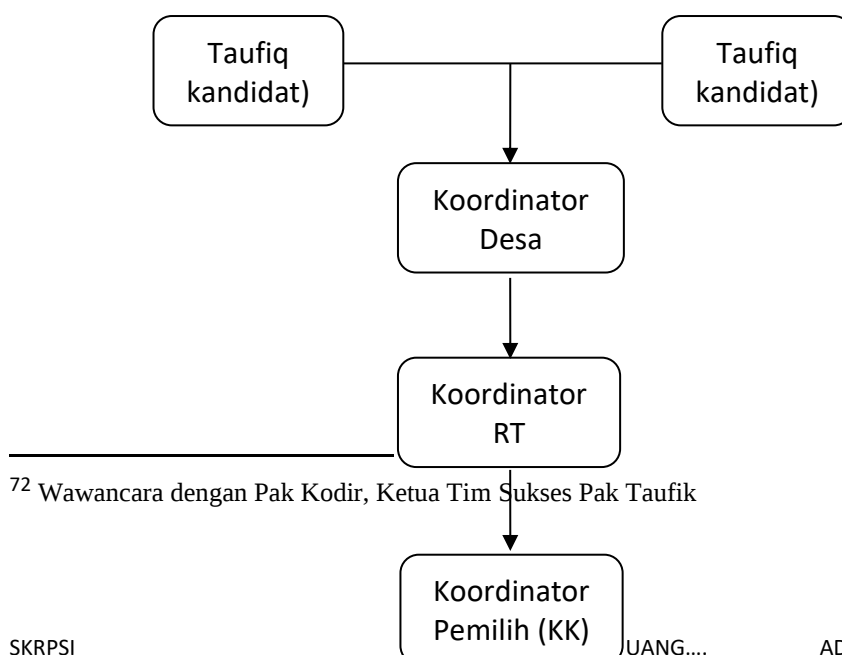
Citra diri (*image*) dalam proses pemilihan umum merupakan hal yang penting, dimana calon ingin menampilkan ragam sisi kepribadian yang bagaimana. Sisi kepribadian yang baik tentu menjadi salah satu alasan kuat untuk pemilih menentukan pilihannya kepada suatu calon. Tidak mungkin pemilih menyerahkan sebagian besar hak-haknya sebagai warga kepada pemimpin yang pelit, atau berperangai buruk. Di titik ini, citra diri Taufiq dibangun sejak dia menjadi ketua RT, bersosialisasi dengan tetangga, membantu kegiatan karang taruna, membiayai kegiatannya. Citra diri sebagai dermawan sosial, dan pribadi yang ramah adalah suatu modal penting di mata pemilih. Nantinya akan kita lihat dimana letak pentingnya “dermawan sosial” dalam praktik klientelisme dan perbandingan dengan citra diri dari Sanadi sebagai Petahana.

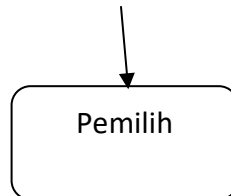
Sebagaimana yang telah dianalisis oleh Tim Sukses, Taufiq telah menetapkan strategi pemenangan yang cukup detail meskipun terkesan sporadis. Kodir memang seorang *think tank* sekaligus broker yang cukup berpengalaman dalam berbagai gelaran pemilihan umum. Di periode sebelumnya, Kodir merupakan bagian dari Tim Sukses Sanadi yang berhasil mengantarkan Sanadi menjadi Kepala Desa Ngabetan. Sanadi juga mengaku juga membantu Yani Putra dalam gelaran pemilihan legislatif kabupaten Gresik tahun 2019, dan berhasil membantu Yani menjadi Ketua DPRD. Akan tetapi, hubungannya keduanya mengalami keretakan dalam perjalanan Sanadi sebagai Kepala Desa. Kodir merasa bahwa Sanadi telah ingkar janji, meskipun dia menampik soal bentuk janji politik Sanadi yang diberikan kepadanya. Kemungkinan besar, keretakan muncul akibat jatah pembagian jabatan atau bentuk proyek lain yang mungkin sedianya diberikan kepada Kodir sebagai bentuk terima kasih sebagai Tim Sukses. Terkait dengan kepindahan broker dan bentuk patronase dalam pemilihan umum akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

Kodir menyebutkan bahwa strategi politik yang dipakai oleh timnya adalah pengumpulan broker-broker kecil yang membawahi beberapa orang yang menjadi

target pemilih. Analisis yang dipakai adalah analisis segmentasi pemilih, dan Kodir tahu bahwa kekuatan Taufiq berada di pemilih pemula atau kelompok pemuda. Tim sukses yang dibentuk oleh Kodir berjumlah lebih dari 100 orang yang harapannya setiap 1 orang dari timnya membawa 10 orang lagi untuk memilih taufiq. 100 orang tim suksesnya secara rentang usia cenderung didominasi oleh pemuda, sekitar 75% dari total jumlah tim sukses diisi oleh pemuda. Kedekatan Taufiq dengan pemuda dimanfaatkan betul oleh Kodir untuk menarik pemuda-pemuda masuk menjadi tim sukses. Seperti yang disampaikan qodir:

“kalau anak-anak muda kebanyakan ke taufiq , pokok kalau semua total itu 153 tim mbk itu udah sama perumahan juga jadi setiap orang gak banyak2 cuma maintain 1 orang bawa 10 suara aja, kan harus 1500 akhirnya dapet 1350, yang sanadi dapet 1100 jadi ya kalah, kalau pa kali masudi 225. saya disini 100 orang di dusun ngabetan, dan 1 orang harus membawa 10 orang itu nantikan jadi 1000 orang dan 1000 orang ini kita amankan agar tidak keluar suaranya.”⁷²





**Bagan SEQ Bagan * ARABIC 2. Struktur Tim Sukses Calon Kepala Desa
Taufiq**

Strategi yang dijalankan oleh Qodir juga dijaga dalam pelaksanaannya, seperti dalam strategi komunikasi yang dijelaskan kepada tim suksesnya. Tim sukses di bawah Kodir telah mendapat penjelasan bahwasanya ketika ada kabar burung negatif tentang Taufiq, maka sikap yang perlu ditunjukkan adalah sikap bijaksana dengan tidak menanggapi secara serius. Komunikasi internal dijaga terlebih dahulu sebelum menentukan sikap, sehingga tidak sampai terjadi *blunder* dalam menyikapi sebuah berita. Begitu juga dengan pesan yang disampaikan dalam kampanye, Kodir juga mewanti-wanti agar Timnya memberikan kabar-kabar baik saja tentang Taufiq tanpa menjelek-jelekkan calon lain. Ini seperti menjaga sikap bijaksana sebagai calon agar tetap terjaga citranya, karena sikap yang dikeluarkan oleh tim sukses akan dipandang sebagai kepanjangan tangan dari calon. Oleh sebab itu, Kodir tahu betul bahwa sikap dari Tim sukses harus dijaga.

Dalam upaya membangun tim sukses, Kodir juga cukup cerdas dengan mampu menarik beberapa broker yang potensial ke dalam tim. Perangkat desa merupakan salah satu *broker* penting dalam menarik suara pemilih karena telah memiliki legitimasi di masyarakat. Akan tetapi, mayoritas perangkat desa, terutama Ketua RT, Ketua RW dan beberapa pegawai desa lain lebih merapat menjadi tim sukses Sanadi. Tentu Sanadi sudah merawat jejaring ini selama menjadi kepala

desa, hal ini dipahami oleh Kodir bahwa dia dan timnya tidak bisa terlalu mengandalkan dukungan dari perangkat desa. Meskipun begitu, beberapa ketua RT, dan LKD, dapat ditarik ke dalam Tim Sukses, diantaranya Kodir sendiri sebagai Ketua RT dan kakak dari Taufiq yang juga menjadi Ketua RT.

Kejelian Kodir dalam menangkap peluang suara juga terlihat dalam memanfaatkan kelemahan calon lain sebagai kekuatan calonnya. Sanadi sebagai petahana, dan Ali Mashudi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ngabetan sudah menunjukkan jejak politiknya, baik yang baik maupun buruk. Keburukan Sanadi selama menjabat sebagai kepala desa diantaranya adalah pembagian proyek-proyek pembangunan desa yang hanya dimonopoli oleh jejaring pribadinya, terutama kakaknya. Dalam beberapa proyek pembangunan desa, Kakak Sanadi selalu menggunakan pekerja proyek dari luar ngabetan. Hal ini yang nantinya akan menjadi salah satu janji politik yang disampaikan oleh Taufiq dalam kampanye untuk membangun desa ngabetan. Taufiq pun menepati janjinya dalam proyek pembangunan desa ketika dia menjadi kepala desa, warga desanya sendiri yang diberdayakan untuk menjadi pekerja proyek.

“itu saluran irigasi mbak kulinya dari orang ngabetan semuanya nggak ngambil orang dari luar, gak kaya pak sanadi kalau paksanadi kan ngambil orangnya dari proyek kebanyakan.”⁷³

Strategi lain yang dilakukan oleh Taufiq adalah strategi silaturrahim, dalam bahasa yang lebih umum dipakai adalah *door-to-door*. Strategi umum ini terbukti efektif dalam upaya mendekatkan calon kepada pemilihnya, dalam hal ini Taufiq bertujuan dua hal, yakni, pertama kepada basis pendukungnya yang berada di dusun ngabetan, terutama ketika dia menjadi Ketua RT. Silaturrahim berfungsi sebagai perekat hubungan antara kandidat dengan pendukungnya, bahkan dengan silaturrahim ini, dapat dianggap sebagai kunci terhadap basis pendukungnya. Di sisi lain, silaturrahim di wilayah pendukung juga dapat memblokir serangan dari calon lain yang ingin mencuri suara dari basis pendukungnya. Silaturrahim juga

⁷³ Wawancara dengan Pak Baihaqi, Kepala Dusun Ngabetan

dilakukan kepada warga-warga di luar ngabetan untuk sekedar pamit atau disebut oleh orang ngabetan sebagai *sowan*. Desa Ngabetan yang juga terdapat perumahan tidak luput dari kunjungan silaturahmi. Silaturahmi jenis kedua ini berupaya untuk mendekatkan hubungan antara Taufiq kepada calon pemilih yang belum tentu menjadi pendukungnya. Taufiq dan tim sukses, menjalankan strategi lebih lanjut untuk mengunci suara pemilih yang belum menentukan suara (masih abu-abu).

Strategi terakhir yang digunakan oleh Taufiq untuk mengunci pemilih adalah dengan strategi klientelistik melalui praktik patronase. Strategi klientelistik ini lumrah terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia, dari pemilihan eksekutif dan legislatif tingkat nasional, sampai di tingkat kepala desa. Untuk lebih detail menganalisis praktik klientelistik dan patronase yang dilakukan oleh setiap calon dan akibat-akibat yang ditimbulkan, akan dibahas dalam sub-bab berikut. Disini akan dijelaskan secara singkat bagaimana Taufiq memakai strategi *vote buying* untuk membeli suara pemilih.

Kodir menang terlihat berpengalaman untuk urusan ini, dengan memperhitungkan peluang kemenangan, Kodir membuat Tim Sukses yang nantinya akan memberikan uang pesangon menjelang hari-H pemilihan di malam hari. Uang yang disediakan oleh taufiq sebesar 150 ribu tiap orang yang disebar untuk basis pendukungnya dan diluar wilayah pendukungnya. Secara detail, Kodir memperagakan bagaimana ia dan timnya menengarai warga yang sudah diberi uang memilih taufiq. Warga yang sudah diberi uang ketika selesai mencoblos, keluar dari bilik coblosan akan memegang tangan kiri, jika tidak menunjukkan tanda yang sudah disepakati, Kodir dan tim akan mendatangi warga tersebut, istilah dari Kodir *melabrak* agar malu. Namun, apakah cara ini efektif dalam mengunci suara dan mengetahui apakah uang tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap pilihan warga akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikut.

Jika dirangkum, faktor kunci kemenangan Taufiq ada dua, *pertama* faktor internal dari pihaknya yang terletak pada kekuatan personalnya, dengan mengandalkan *kharisma*, jejaring personal, citra diri yang baik di mata warga, tim sukses yang solid, sekaligus strategi klientelistik. *Kedua*, adalah faktor di luar

pihaknya yaitu warga masyarakat yang telah jenuh dan cenderung tidak menyukai dengan kepemimpinan Sanadi dan Ali Mashudi. Pertemuan dua faktor kunci ini yang mengantarkan Taufiq menjadi kepala Desa Ngabetan melawan petahana dan mantan kepala desa.

3.5 Interpretasi Teoritik

Pada fenomena kemenangan Taufik menjadi Kepala Desa Ngabetan dan lebih universal lagi pada proses Pilkades Ngabetan tahun 2019 yang melibatkan 3 calon, pendukungnya, serta sekaligus masyarakat Desa Ngabetan, terdapat relasi patron dan klien yang dapat dijelaskan secara detail. Patron dan klien terbentuk akibat fenomena ketidaksetaraan dalam segi sosial dan politik, serta sejumlah faktor lainnya. Patron, menurut James C. Scott memiliki suatu kedudukan atau posisi yang tinggi dari klien, dan kerap disebut relasi tersebut terbentuk karena ada situasi ‘saling bantu’ antar-keduanya.⁷⁴ Patron dan klien biasanya terjadi dan ada dalam konteks proses demokrasi yang berjalan di ranah elektoral. Misalnya, konotasi patron lebih sering melekat pada politisi dan klien adalah tim pendukung atau masyarakat. Edward Aspinall menyebut bahwa relasi klientelistik—sebagai sebutan untuk karakter hubungan antara politisi dengan pendukungnya.⁷⁵ Dalam Konteks Pilkades Ngabetan, Taufik dan pendukungnya—yang diidentifikasi sebagai tim sukses dan pemuda karang taruna sebagai pendukungnya, terlebih pendukung-pendukungnya yang lain di luar kelompok tersebut, dapat disebut sebagai patron dan klien, yang mana saling membantu untuk merebut kekuasaan patronnya sebagai kepentingan yang dipertukarkan. Tak hanya Taufik, Sanadi dan Ali Mashudi pun juga memiliki klien yang mana hingga Pilkades tahun 2019 ini juga menggunakan relasi serupa dengan Taufik, sebab keduanya juga memiliki *bargain* politik dan sumber kekuasaan sebagai calon Kepala Desa.

⁷⁴ James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta. LP3S, 1983) hlm. 14 dan David Jarry, *Dictionary of Sociology*, (London. Harper-Collins Publishers, 1991) hlm. 458.

⁷⁵ Edward Aspinall, Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta. Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM, 2015) hlm. 4.
Ibid. hal.6

Hutchcroft menyebut bahwa klientelisme adalah relasi kekuasaan antara politisi dengan kliennya yang cenderung personalistik, biasanya akan berulang, dan lebih jauh dari patronase biasa—yang diartikan dengan perbedaan mendasar bahwa patronase hanyalah pertukaran manfaat secara material yang didistribusikan untuk memperoleh dukungan politik.⁷⁶ Dalam Pilkades Ngabetan 2019, para calon membangun hubungan yang didasarkan pada pertukaran manfaat yang bersifat materialistik kepada pendukungnya melalui bantuan tunai secara langsung, suntikan dana untuk pengusaha dan pedagang, sumbangan masjid, dan pengerahan dana kampanye yang didistribusikan kepada tim pendukungnya. Relasi tersebut tak hanya berlangsung sekali, namun secara berkala dan terpelihara. Misalnya dalam kasus petahana Sanadi, dalam pilkades sebelumnya yang juga membentuk jejaring patron-klien yang sama dengan apa yang dilakukannya pada Pilkades 2019.

Dalam penelitian tentang pemilihan kepala desa, seringkali yang menjadi sorotan adalah tentang strategi pemenangan dan kontestasi. Kedua hal tersebut dalam penelitian ini menjadi instrumen penghubung menuju pembongkaran klientelisme. Dalam gelaran pemilihan kepala desa di Ngabetan. Penelitian ini membahas mengenai juga bagaimana proses Pilkades berjalan dan strategi apa yang digunakan oleh para calon. Nyatanya pembahasan tersebut berhasil membuka tabir pemilihan kepala desa cukup menarik dengan berbagai temuan seperti praktik patronase dan hubungan klientelisme di antara kandidat. Menurut Hickens, menjelaskan bahwa definisi klientelisme setidaknya memiliki tiga unsur, yaitu *pertama*, timbal balik pemberian barang atau jasa dengan imbalan langsung terhadap keuntungan yang diberikan oleh pihak lain (dalam hubungan patron-klien). *Kedua*, Hierarkis; adanya penekanan pihak satu (patron) terhadap pihak lain

⁷⁶ Hutchcroft, Paul D. 2014. "Linking Capital and Countryside: Patron- age and Clientelism in Japan, Thailand, and the Philippines." Dalam Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov. Hal. 5

(klien), dengan kata lain relasi kekuasaan yang tidak seimbang. *Ketiga*, Pengulangan; pertukaran diantara keduanya berlangsung terus menerus.⁷⁷

Aspinall menggarisbawahi bahwa patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sedangkan klientelisme merujuk pada karakter relasi antara kandidat (politisi) dan pemilih atau pendukung.⁷⁸ Dalam Pilkades Ngabetan 2019, di antara ketiga kandidat kepala desa Ngabetan, hanya Taufiq dan Sanadi yang menggunakan praktik patronase dan jejaring klientelistik dalam proses berjalannya Pilkades. Sedangkan Ali Mashudi tak lagi diidentifikasi sebagai aktor dalam klientelisme berdasarkan data yang ditemukan pada penelitian ini. Namun pada Pilkades sebelumnya, Ali Mashudi menjalankan praktik Patronase ketika sebelum terpilih menjadi kepala desa di tahun 2007.

Taufiq menggunakan praktik patronase melalui jejaring klientelistik yang sudah dibangun sejak kepindahannya ke desa Ngabetan. Selama menjadi ketua RT, Taufiq telah membangun jejaringnya melalui berbagai pendekatan kepada warga, terutama kepada pemuda karang taruna. Pendekatan informal yang digunakan kepada pemuda dibangun Taufiq melalui keseharian cangkruk di warung kopi. Dari sekedar obrolan biasa, intensitasnya meningkat menempatkan Taufiq menjadi patron dari pemuda karang taruna yang sering memberikan masukan, nasehat bahkan uang untuk mendukung kegiatan kepemudaan. Jejaring klientelisme Taufiq kepada warga secara umum dibangun melalui kemudahan memberikan bantuan ketika warga membutuhkan, dalam konteks ini kemudahan pengurusan surat kependudukan, atau sejenisnya. Selain itu, Taufiq sering menjenguk tetangganya yang sakit dengan memberi sedikit oleh-oleh, atau sebaliknya ketika ada orang sakit datang ke dia untuk minta *suwuk* (pengobatan spiritual). Hubungan ini semakin kuat

⁷⁷ Hicken, A. (2011). *Clientelism, Annual Review of Political Science* 14: 289-310 dalam Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov. Hal. 8

⁷⁸ Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov. Hal. 5

dengan adanya pandangan masyarakat kalau Taufiq memiliki kekuatan supranatural.

Jejaring klientelisme yang dibangun oleh Taufiq diperkuat dengan adanya praktik patronase yang sudah dilakukan sejak dia menjadi ketua RT. Praktik patronase akan semakin efektif jika berlangsung di dalam jejaring klientelistik murni. Praktik patronase juga memiliki beragam varian dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah, *vote buying*, *pork barrel*, *club goods*, *individual gifts*, dan bentuk khusus ketika kandidat memberikan janji kepada *broker* atau anggota tim sukses keuntungan yang bersifat lebih berkelanjutan seperti pekerjaan atau akses terhadap proyek-proyek pemerintahan. Menganut definisi yang dipakai oleh Aspinall dan Sukmajati, *vote buying* atau pembelian suara dimaknai sebagai distribusi uang tunai/barang dari kandidat kepala pemilih dalam beberapa hari menjelang pemilihan yang disertai harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Menarik dari temuan di lapangan bahwa, *vote buying* ini berlangsung dengan semacam akad jual beli secara eksplisit, dimana kandidat memberi uang dan penerima berkeharusan untuk memilihnya. Seperti yang dilakukan oleh Kodir (ketua Tim Sukses Taufiq) kepada warga penerima uang pesangon. Kodir akan mendatangi (melabrak) warga yang telah diberikan pesangon jika tidak memilih Taufiq.

Variasi lain dari praktik patronase yang dilakukan oleh Taufiq adalah praktik *pork barrel* berupa sumbangan uang 100 juta dalam pembangunan masjid desa Ngabetan. Selain Taufiq, Sanadi juga melakukan hal serupa meskipun dalam hal ini, jejaring klientelistik yang dibangun oleh Sanadi tidak berjalan baik. Sanadi semasa menjadi Kepala Desa, ia membangun beberapa fasilitas seperti Ponkesdes, Rumah Toko, dan Jalan desa. Varian lain yang digunakan adalah berupa *club goods* atau barang-barang bersama yang ditujukan untuk sekelompok atau komunitas tertentu. Hal ini dipakai oleh Taufiq untuk menarget pemuda karang taruna, dengan menjanjikan fasilitas olahraga.

Dalam kemenangan Taufik sebagai kepala desa yang mana mengungguli petahana dan mantan kepala desa sebelum petahana, membuktikan bahwa

klientelisme merupakan strategi sekaligus faktor yang sangat mempengaruhi hasil pemilu, yang amna dalam hal ini Pilkades Ngabetan. Taufik menukarkan pelbagai ‘manfaat’ dengan suara yang mengantarkannya untuk menjadi orang nomor satu di Desa Ngabetan. Fenomena ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ward Berenschot bahwa klientelisme dapat secara signifikan berpengaruh pada kemenangan kandidat dalam pemilu.⁷⁹ Selain itu, dalam temuan data lapangan mengenai ‘manfaat’ dalam bentuk material secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan oleh patron dalam relasi klientelistik menjelaskan mengenai media transaksi yang beragam untuk memperat relasi demi berlangsungnya timbal balik secara jangka panjang.⁸⁰

Praktik patronase sebesar apapun materinya, tidak berjalan efektif tanpa peran broker atau dalam konteks ini adalah Tim sukses. Broker menempati peran sentral dalam menghubungkan antara kandidat dengan pendukung, dimana tugasnya adalah selain mendistribusikan barang-barang atau jasa patronase, juga berperan meyakinkan pemilih, dan mengawasi barang-barang dan jasa yang telah diberikan menghasilkan timbal balik berupa suara. Taufiq dinilai tepat memilih Kodir sebagai ketua Tim sukses, latar belakangnya adalah pegawai pemerintah kabupaten di Badan Pusat Statistik. Kodir berperan menangani seluruh usaha pemenangan, dari urusan daftar pemilih tetap, *lobbying*, strategi kampanye, hingga pemegang “dompet”. Jejaring klientelisme yang dipakai Kodir, ia membuat struktur tim sukses seperti yang sudah ditunjukkan di atas. Dengan begitu, distribusi patronase mengalir secara jelas dan dapat diawasi. Meskipun tetap menyisakan masalah seperti dalam praktik patronase lain, yaitu permasalahan timbal balik. Dimana pemberian uang pesangon tidak 100 % kembali berupa 100 % suara.

Terakhir, menurut Aspinall, dalam Politik klientelisme, seringkali menggunakan mesin-mesin jaringan sosial berupa tim sukses yang terorganisir berdasarkan teritori. Selain itu, juga seringkali kandidat mencari dukungan dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh, baik yang memiliki jabatan formal seperti

⁷⁹ Paul Hutchcroft, *Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and Philippines* dalam Aspinall dan Sukmajati *op.cit.* hlm. 5.

⁸⁰ Berenschot Ward dan Edward Aspinall. *Op.cit.* hlm. 250.

ketua RT, ketua RW, atau pemimpin organisasi, maupun para tokoh informal seperti tetua desa, tokoh keagamaan, atau tokoh adat.⁸¹ Seperti yang juga dipakai oleh Taufiq, Kodir membentuk tim suksesnya yang terorganisir sesuai teritori, dengan tiap koordinator di tiap RT. Setiap koordinator RT bertanggung jawab kepada Koordinator Desa (Ketua dan Wakil Ketua), sedangkan Koordinator Desa bertanggungjawab kepada Ketua Tim Sukses (Kodir), dan Terakhir Kodir bertanggung jawab langsung ke Calon Kepala Desa (Taufiq). Mesin ini lah yang memastikan kemenangan Taufik sebab berhubungan secara langsung dengan hasil (suara) yang didapat dalam Pilkades Ngabetan 2019.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian yang bertajuk “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Ngabetan Tahun 2019” ini disimpulkan dalam beberapa poin yang menjadi jawaban akhir berdasarkan temuan analisis data yang telah dilakukan dari 2 (dua) pertanyaan penelitian yang diajukan—bagaimana pola transaksi jual-beli suara yang dilakukan oleh para kandidat pada Pilkades Ngabetan Tahun 2019 dan bagaimana bentuk klientelisme yang terjadi di balik kemenangan kandidat kepala desa terpilih dalam

⁸¹ Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov. Hal. 38

pemilihan kepala desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Pertama, Desa Ngabetan memiliki tatanan masyarakat yang cukup bervariasi, yakni masih tergolong masyarakat yang tradisional—dari segi sosial, agama, maupun kebudayaan. Dalam konteks Pilkades 2019, tatanan tersebut berpengaruh terhadap pola pikir dan sikap masyarakat untuk menghormati elit non-politik yang dijadikan sebagai panutan di Desa Ngabetan dan sekaligus dijadikan celah oleh para kandidat Pilkades 2019 untuk memperebutkan suara pemilih.

Pola transaksi jual beli suara yang ada pada Pilkades 2019, sebagian besar calon (kecuali Ali Mashudi) mendistribusikan uang tunai kepada pemilih menjelang pemilu. 2 (dua) kandidat yakni petahana Kepala Desa Sanadi dan Taufik juga menjalankan banyak strategi yang berhubungan dengan jaringan klientelistik seperti politik uang dan *pork barrel* yang ia berikan kepada pemilih dan broker politik yang bermain di Pilkades 2019. Taufik sebagai pemenang Pilkades Ngabetan 2019, membangun jejaring klientelisme secara natural maupun mekanis. Dalam hal ini, Taufik memegang *trust* masyarakat dan kunci broker dalam politik uang. Keberadaan broker yang menjadi *smooth operator* dalam praktik politik uang ini menjadi penting. Sebab, ia memegang peran yang memiliki data suara warga, jaringan politik uang, serta titik lemah lawan kandidasi yaitu Sanadi. Taufik membangun relasi sosialnya dengan warga Ngabetan secara keseluruhan sehingga ketika melakukan transaksi jual-beli suara menjelang Pilkades, warga lebih mempertimbangkan memilih Taufik meskipun jumlah nominal yang diberikan lebih kecil daripada ‘manfaat’ yang diberikan oleh Sanadi. Selain itu, Taufik juga gemar menyumbang untuk kepentingan desa, dan mengakomodir warga Ngabetan dalam proyek-proyek desa, dalam fenomena ini sesuai dengan teori klientelisme milik Edward Aspinall disebut sebagai *pork barrel*. Berkaitan dengan kemenangan Taufik atas Sanadi, hal tersebut (*pork barrel*) tidak cukup efektif dilakukan oleh Sanadi di periode sebelumnya. Selain itu, Taufik juga melakukan pola transaksi *club goods* dengan pihak pemuda atau karang taruna sebagai kekuatan utama pendukung yang telah mengantarkannya ke tahta Kepala Desa Ngabetan.

4.2 Saran

Saran yang diajukan oleh penulis meliputi saran untuk penelitian ini, penelitian lain yang membahas tentang topik serupa dengan penelitian ini, kemudian juga saran terhadap Pemerintah guna merefleksikan poin-poin dari politik uang yang mana bagi penulis merupakan sebab-sebab mundurnya demokrasi di Indonesia.

1. Penelitian ini kurang berfokus terhadap bagaimana politik uang menjadi sebuah isu utama yang diterima oleh masyarakat Ngabetan, sehingga ‘hulu’ dari politik uang yang mana berdasarkan permintaan dan penawaran belum dijelaskan secara detail. Hal tersebut juga dikarenakan penelitian ini lebih mengacu fenomena klientelisme sebagai strategi pemenangan para kandidat.

2. Bagi peneliti yang hendak mengambil topik penelitian serupa, yakni politik uang, patron-klien, dan klientelisme agar lebih mencari subyek penelitian yang bervariasi dan mengkaji obyek penelitian yang memiliki fenomena unik dan lebih menarik.

3. Pemerintah sebagai penjaga iklim demokrasi yang sehat—sesuai dengan apa yang diyakini oleh penulis—harusnya dapat melahirkan kebijakan anti-politik uang yang bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia dan membentuk kesadaran masyarakat serta politisi-politisi akan bahayanya politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S., & Yuliana, L. (2008). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Aspinall, E., & Mada, S. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Aspinall, E., & Ward, B. (2019). *Democracy For Sale, Elections. Clientelism, and The State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Douglass, N. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic*. London: Cambridge University Press.
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- HAW, W. (2003). *Pemerintahan Desa Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jarry, D. (1991). *Dictionary of Sociology*. London: Harper-Collins Publishers.
- Juliantara, D. (2003). *Pembaharuan Desa, Bertumpu pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Keller, S. (1984). *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali.
- Ledge, J. (1961). *Central Authorority and regional in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Saiful Mujani, W. L. (2012). *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Samuel P Huntington, J. N. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sarwo Edi, F. R. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Leutikaprio.

Schroder, P. (2013). *Buku Strategi Politik*. Indonesia: Friedrich-Naumann-Siftung Fuer Die Freiheit.

Scott, J. C. (1983). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3S.

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.

Siti Aminah, R. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenamedia Group.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual review of Political Science*, 289-310.

Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*.

Internet

Arfah, H. (2019, Agustus 3). *News*. Retrieved Maret 2020, 4, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2019/08/03/19285871/buntut-pilkades-anak-anggota-dprd-gresik-dilaporkan-ke-polisi>

Harian Andalas. (2019, 8 8). *Harian Andalas*. Retrieved Maret 10, 2020, from Harian Andalas: <https://harianandalas.com/sumatera-utara/fenomena-pilkades-di-palas-58-persen-petahana-gagal-pertahankan-jabatan>

Joglo Semar news. (2019, 10 1). *News*. Retrieved Maret 10, 2020, from Joglo Semar News: <https://joglosemarnews.com/2019/10/fenomena-pilkades-sragen-sebanyak-58-calon-petahana-tumbang-rata-rata-kalah-di-tangan-pendatang-baru/>